

BAB 5

Restrukturisasi Kebijakan Luar Negeri Indonesia Di DK PBB Pada Era Presiden Jokowi

Indonesia merupakan negara yang menaruh perhatian yang besar di DK PBB dan secara luas pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri RI terus melakukan diseminasi aktivitas, pencapaian, dan posisi Indonesia di DK PBB. Dalam hal ini perlu di ketahui bahwa narasi yang dikedepankan oleh Indonesia pada tema keanggotaannya di DK PBB pada tahun 2019 – 2020 adalah “*a True Partner for World Peace*” yang menjadi salah satu cerminan kuat bahwa Indonesia ingin dan memiliki mimpi untuk menjadi aktor yang diperhitungkan dalam arsitektur keamanan internasional. Pada bab ini, peneliti akan fokus membahas proses dan mengaitkan kembali poin dari analisis konvergensi restrukturisasi kebijakan luar negeri dari negara *middle power* yang “dekat” secara karakter dengan kebijakan luar negeri Indonesia di kawasan Asia Timur dan ASEAN. Peneliti dalam bab ini juga akan membahas terkait bagaimana Indonesia membangun perannya dan apa saja kontribusi dan analisis yang menjadi temuan – temuan dari keanggotaan dan kontribusi Indonesia di DK PBB. Penelitian pada bagian ini juga akan membahas berbagai indikator dari model restrukturisasi kebijakan luar negeri KJ Holsti untuk menjadi kerangka berpikir pada bab penelitian ini.

Keanggotaan tidak tetap Indonesia di DK PBB merupakan salah satu manifestasi *foreign policy activism* Indonesia yang menurut penulis merupakan hasil dari restrukturisasi kebijakan luar negeri Indonesia yang terus bertumbuh dari masa ke masa, dari satu era pemerintahan ke era lainnya. Hal ini tentunya terbangun sejak era kemerdekaan yang kemudian di mandatkan dalam pembukaan UUD 1945, dan yang kemudian di kembangkan terus menerus dan mengalami restrukturisasi secara fundamental namun tetap dalam arah yang sama sesuai mandat konstitusi. Dalam pembahasan dengan narasi yang lebih tekstual, menurut penulis, aktivisme dari kebijakan luar negeri memang harus dikaji dari masa ke masa, dan hal ini akan terus

Hino Samuel Jose, 2022

QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

relevan. Beberapa kajian tekstual membahas berbagai faktor yang terus berpengaruh dan menjadikan analisis perbandingan dari era ke era semakin relevan untuk dilakukan sebelum kita membahas restrukturisasi kebijakan luar negeri.

Pada bab kelima ini, penelitian akan membangun jalan analisis dimulai dari sebuah *process tracing* restrukturisasi kebijakan luar negeri Indonesia dari masa Presiden Megawati dan Presiden SBY (era Menlu Hassan Wirajuda), masa Presiden Susilo SBY di bawah kepemimpinan Menlu Marty Natalegawa, dan Presiden Joko Widodo di masa kepemimpinan Menlu Retno Marsudi. Adapun pada bagian bab ini, analisis akan menempatkan ketiga elemen yang telah ditemukan dari analisis konvergensi di bab ke empat untuk menjadi salah satu elemen analisis. Kemampuan negara untuk meraih otonomi dalam pengelolaan kebijakan luar negeri, persepsi terhadap isu kawasan, dan faktor kepemimpinan dan domestik menjadi ketiga acuan yang digunakan dalam pembahasan dan analisis dalam bab kelima ini. Dari pembahasan di bab ini menggunakan tiga elemen yang dihasilkan pada analisis konvergensi pada bab keempat sebelumnya, penelitian ini kembali menemukan model pre teori baru yang masih prematur namun memberikan elaborasi yang koheren terhadap diplomasi multilateral Indonesia di DK PBB yang telah mengalami restrukturisasi sebagai *middle power* di bawah era Presiden Joko Widodo.

A. Fondasi Process Tracing dari Pembangunan Basis dan Intervensinya dalam Proses Restrukturisasi Kebijakan Luar Negeri

Menurut penulis, dalam kaitannya dengan DK PBB, tentunya kita akan fokus pada fondasi pertama yaitu, bagaimana Indonesia, memiliki kemampuan kognitif dalam membangun penilaian, analisis, dan telaah. Hal ini tentu penting karena ketika bicara DK PBB, tentu kita akan bicara tentang bagaimana kita bisa memiliki landasan kognitif yang kuat sebagai prinsip dan basis norma dasar yang menjadi arahan dan posisi kita menavigasi berbagai kepentingan dan pengambilan keputusan serta posisi nasional (Saphiro & Bonham, 1973) yang sifatnya *high politics* pada forum DK PBB

Hino Samuel Jose, 2022

QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

yang merupakan forum dengan derajat strategisitas dan politik yang tinggi. Gaya tarik ulur kepentingan politik dan negosiasi di DK PBB sangatlah lebih sulit karena akan melibatkan pendekatan negara *middle power* seperti Indonesia, dengan negara P5 yang lebih kuat secara politik karena merekalah yang memiliki restu akan keputusan yang akan diambil baik yang diusulkan oleh E-10 ataupun sesama P5. Kognitif ini sendiri akan berkaitan secara langsung pada pengambilan keputusan, dan pada contoh kasus penelitian ini, berkaitan dengan pendirian apakah Indonesia akan membangun posisi setuju, netral, maupun tidak mendukung pada inisiatif atau norma yang diajukan pada dinamika pembahasan dan proses pengambilan keputusan DK PBB. Hal ini tentu akan berujung pada dihasilkannya kebijakan yang akan dibawa ke DK PBB untuk di negosiasikan juga agar di terima oleh aktor lainnya yang terlibat, serta agar menjadi referensi bagi para aktor lain yang juga berinteraksi secara politis untuk mereka mengukur pendekatan/ tanggapan mereka terhadap posisi Indonesia di DK PBB.

Misalkan dalam isu Palestina, apabila Indonesia posisi nasionalnya fokus pada implementasi *two state solution*, maka negara *likeminded* lain bisa membangun aliansi/ dukungan terhadap pandangan Indonesia di DK PBB, dan negara yang kontra dengan posisi Indonesia dapat terus berkonsultasi untuk mencapai kesepakatan dan negosiasi yang konstruktif. Kemudian pada fondasi kedua, kita akan berbicara terkait bagaimana kompetisi birokratis yang terjadi dalam proses restrukturisasi kebijakan luar negeri Indonesia, dalam artiannya, adalah bahwa penyusunan dan berbagai keputusan yang akan diambil terkait dengan kebijakan luar negeri pada hakikatnya akan sangat berkaitan pada proses politik *vis-a-vis* birokrasi dari para aktor yang memegang tugas dan fungsi/ yang terlibat dalam struktur pemerintahan. Hal ini dalam kaca mata isu keanggotaan tidak tetap Indonesia di DK PBB justru tentu akan terkait dengan proses birokrasi nasional dalam mempersiapkan pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB, eksekusi kampanye, sinergi antar institusi pemerintah untuk harmonisasi posisi dasar dan prioritas kebijakan luar negeri multilateralnya, dan proses konsultasi untuk meraih posisi dasar dan implementasi berbagai inisiatif yang tidak

Hino Samuel Jose, 2022

QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

hanya jatuh pada Kementerian Luar Negeri, namun pada institusi terkait pada isu – isu yang menjadi pembahasan di DK PBB, proses Presidensi Indonesia selama masa keanggotaannya, dan bagaimana evaluasi/ penyusunan kebijakan lanjutan pasca masa keanggotaan tidak tetap DK PBB dibentuk sebagai bentuk kesinambungan kontribusi Indonesia pada perdamaian global. Hal ini secara tekstual tentunya akan melibatkan proses politik dan birokrasi dengan aktor – aktor terkait: (1) pada isu keamanan (memastikan apakah suatu keputusan akan berpengaruh pada keamanan nasional atau tidak); para aktor yang bertanggung jawab pada isu keorganisasian/ kelembagaan suatu negara (memastikan bahwa seluruh keputusan yang diambil sudah ditetapkan melalui hirarki dan sesuai dengan kepentingan organisasional suatu pemerintahan); (2) aktor kepala pemerintahan dan politisi domestik (yang umumnya juga merupakan isu partisan/ isu yang menjadi perdebatan/ perhatian publik dan memiliki derajat muatan politik yang signifikan bagi kesinambungan suatu era pemerintahan); (3) aktor yang merupakan pejabat karir/ birokrat yang juga memiliki kepentingan dan keinginan dirinya sendiri untuk agar masukan dan rekomendasi kebijakan mereka di dengar, terlibat, dan bahkan mendapat posisi resmi yang bersifat manajerial/ dalam level pimpinan (aktor pejabat karir dan pemerintahan yang secara teknis dan aktual di lapangan/ di infrastruktur diplomasi suatu negara melaksanakan implementasinya) (Halperin, 1974); (4) bagaimana kebijakan luar negeri itu sendiri diputuskan yang dalam prosesnya melibatkan pembentukan aturan main, inisiatif, perencanaan strategi keputusan, argumentasi antar pihak yang mendorong kebijakan tersebut untuk diterapkan dan direkomendasikan kepada pimpinan, manuver para aktor pembuat kebijakan dalam mendorong argumentasinya (Halperin & Clapp, 2006).

Dan fondasi ketiga adalah opini publik yang dalam hal ini juga mencakup proses bagaimana agar keputusan yang diambil dapat diterima sebagai informasi yang koheren dengan apa yang direkomendasikan/ dibuat/ akan diputuskan (Hinckley, 1992). Dalam konteks keanggotaan tidak tetap Indonesia di DK PBB, opini publik juga digunakan sebagai bentuk asesmen pemerintah untuk melihat antusiasme dan kepekaan

Hino Samuel Jose, 2022

QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

masyarakat akan suatu momen unggul yang di gadang – gadangkan sebagai pencapaian terbaik diplomasi Indonesia untuk meraih kepercayaan komunitas internasional sebagai mitra perdamaian. Opini publik yang mendukung dan memberikan tanggapan/ pujian positif kepada pemerintah Indonesia tentu dapat menjadi hasil positif bahwa rakyat merasakan *added value* dari partisipasi Indonesia di DK PBB secara moril dan materil (dalam kaitannya pada isu – isu konkret seperti Palestina, kesetaraan gender, terorisme, dan kejahatan transnasional, yang di mana isu – isu ini juga dibahas selama Indonesia menjabat menjadi anggota tidak tetap DK PBB tahun 2019 – 2020. Kemudian hal ini juga mencakup penggunaan media pers untuk diseminasi dan membangun opini publik, melibatkan petinggi negara, dan bagaimana kebijakan yang diputuskan tersebut menjadi alat pengaruh yang kemudian akan di implementasikan, dikontrol prosesnya di lapangan (Hinckley, 1992; Halperin & Clapp, 2006). Sedangkan untuk fondasi ke empat adalah politik domestik yang sebenarnya juga bersinggungan dengan poin sebelumnya yaitu terkait unsur isu politik domestik (mencakup parlemen dan lainnya yang terlibat dalam keputusan kebijakan luar negeri), aktor – aktor dalam negeri; atau dalam kajian terkait restrukturisasi, fokus pada model *two level game* antara aktor di level pertama yaitu negosiator yang berhadapan dengan lawannya, dan level kedua yaitu aktor level domestik dengan oponon di level domestik yang apabila kita silangkan interaksinya, akan menghasilkan sebuah restrukturisasi (Fearon, 1998; Putnam, 1988).

Dalam konteks DK PBB, poin ke tiga dan ke empat merupakan dua poin yang saling komplementer, karena menurut penulis bahwasannya pembangunan opini publik dan citra pemerintah yang terbentuk melalui keberhasilan mesin diplomasi Indonesia di DK PBB akan menjadi basis dari pertanggung jawaban pemerintah dengan para wakil rakyat di parlemen pada pemerintahan yang demokratis seperti di Indonesia. Ada bukti konkret bahwa rakyat tahu, dan Indonesia menerima manfaat, yang niscaya para anggota parlemen juga bisa terus mendukung pemerintah dalam proses ratifikasi – ratifikasi instrumen internasional dan penyusunan kebijakan nasional yang muatan

Hino Samuel Jose, 2022
***QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI
RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN
KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

substansi/ ruh kebijakannya sangat terkait dengan isu prioritas Indonesia di DK PBB. Dan utamanya, dalam konteks yang berkaitan dengan restrukturisasi kebijakan luar negeri, opini publik yang terbentuk melalui muatan konten apa yang disalurkan terhadap media akan memberikan pengaruh yang mungkin menggeser posisi pemerintah sejalan dengan pandangan rakyat (Setiawan, 2019). Pergeseran, opini publik, dan diseminasi yang dilakukan pemerintah kelak akan sangat menjadi tolak ukur/ acuan utama pemerintah dalam melakukan evaluasi dan mengukur bagaimana intervensi publik dalam posisi negara di DK PBB dilakukan. Hal ini penting untuk diperhatikan di negara demokrasi seperti di Indonesia, yang niscaya menurut penulis, intervensi publik akan menjadi bahan evaluasi/ bahan acuan untuk restrukturisasi kebijakan luar negeri secara berkesinambungan dan untuk mengkapitalisasi potensi dan manfaat yang diperoleh untuk peningkatan citra bangsa, kontribusi dalam tata kelola global pada isu perdamaian dan keamanan, dan menunjukkan bahwa peran aktif pemerintah terus dilakukan dalam menjaga kestabilan sambil mengedepankan isu prioritas untuk membangun negara sambil mempromosikan multilateralisme.

Dari pembahasan diatas, bagian dalam penelitian ini membagi pembahasan dalam tiga pilar utama untuk menjadi basis dari *process tracing* yang dilakukan dalam membahas dan mengkonstruksikan realita restrukturisasi kebijakan luar negeri Indonesia. Yang di mana dapat disimpulkan juga, bahwa menurut penulis, ketiga pilar ini saling berkaitan, di mana turunan proses operasional kemampuan kognitif negara dalam penyusunan posisi dan telaah kebijakan luar negerinya akan berinteraksi dan menerima umpan balik dari turunan pilar kedua terkait politik birokrasi domestik yang melibatkan interaksi dan tarik ulur kepentingan para aktor yang terkait dengan birokrasi politik luar negeri Indonesia. Namun terkait pilar ketiga tentang opini publik, ia hanya berkaitan secara satu arah dari politik birokrasi (pilar kedua). Ilustrasi ini menggambarkan juga kerangka berpikir penulis dalam membahas basis restrukturisasi kebijakan luar negeri utamanya dalam memberikan gambaran *what's next* atau apa kelanjutan dari suatu proses restrukturisasi kebijakan luar negeri dan bagaimana

Hino Samuel Jose, 2022

QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

intervensi dari masing – masing elemen yang terlibat dari pilar tersebut membangun dinamika polugri negara.

Hal ini kemudian tentu sangat relevan apabila kita membahasnya apabila kita menggambarkan visualisasi dari pembahasan terkait basis restrukturisasi kebijakan luar negeri seperti yang di bahas pada bagian sebelumnya dengan berbagai faktor yang telah di bahas pada beberapa paragraf di atas pada bagian ini seperti yang divisualisasikan pada gambar di bawah ini.

Gambar 6. Ilustrasi Basis dari Pilar *Process Tracing* dari Restrukturisasi Kebijakan Luar Negeri Indonesia



Sumber: Diolah oleh penulis.

Dari gambar di atas merujuk pada pembahasan sebelumnya, penulis menemukan kerangka pre teori yang masih bersifat prematur ini. Adapun dalam hal ini

Hino Samuel Jose, 2022

QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

dimulai dari pilar pertama terkait kemampuan kognitif aktor negara dalam formulasi kebijakan luar negeri di pengaruhi oleh tiga elemen utama yaitu bagaimana proses analisis/ telaah kebijakan berjalan yang digunakan untuk menyusun posisi dan menyampaikannya kepada aktor negara lain. Namun, dalam hal ini ketiga elemen tersebut berkaitan secara dua arah dengan tiga elemen pilar kedua terkait politik birokrasi domestik yang di bahas pada bagian sebelumnya. Ketiga elemen politik birokrasi tersebut adalah kompetisi birokratis antar aktor pemerintah yang melibatkan proses dan kepentingan para aktor birokrasi yang bermain dalam menuangkan kebijakan/ mempromosikan usulan mereka untuk menjadi ketetapan. Dalam hal ini ketiga elemen pilar kedua tersebut mempengaruhi juga proses yang terjadi dalam tiga elemen pilar pertama. Adapun pada pilar kedua, elemen kedua yaitu proses birokrasi aktor yang terlibat secara khusus juga mempengaruhi dua elemen dari pilar ketiga opini publik. Adapun kedua elemen yang di pengaruhi di pilar ketiga oleh elemen kedua di pilar kedua adalah proses birokrasi aktor yang terlibat dalam pembentukan kebijakan luar negeri yang menggunakan elemen daripada opini publik untuk materilaisasi kepentingan ansional dan untuk diseminasi kepada publik. Selain itu, proses birokrasi aktor ini juga melibatkan pembentukan opini dan intervensi publik yang secara langsung juga merupakan turunan dari elemen diseminasi publik dan materialisasi manfaat nasional. Kemudian untuk pilar kedua, terkait kepentingan para aktor domestik yang terlibat juga berinteraksi satu arah dengan akuntabilitas dan evaluasi untuk perubahan kebijakan luar negeri. Dalam hal ini aktor domestik merupakan konstituen yang akan merasakan dampak kebijakan luar negeri yang telah disepakati berdasarkan kepentingan aktor negara. Hal ini tentu menjadi unsur penilaian akuntabilitas dan untuk evaluasi kebijakan luar negeri kedepannya agar bisa lebih baik lagi.

Dari ketiga pilar tersebut, pola interaksi, serta elemen yang ada, maka dalam konteks restrukturisasi kebijakan luar negeri, penelitian ini membahas bahwa ketiga pilar itu lah yang akan mempengaruhi bagaimana kebijakan luar negeri mengalami

Hino Samuel Jose, 2022

QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

perubahan struktur. Adapun kebaruan dari pre teori temuan dari penelitian ini adalah di karenakan setiap elemen yang di bahas telah dikaji oleh penelitian sebelumnya, namun tidak ada kerangka yang mengkonsolidasikan pembahasan antara elemen – elemen tersebut sehingga penelitian ini menguatkan ketiga pilar dan elemennya sebagai faktor pengaruh. Restrukturisasi kebijakan luar negeri sebagai negara menengah tentu dilakukan dengan berbagai kepastian bahwa negara akan terus mempertimbangkan aktor domestik dan eksternal secara terus menerus dengan posisi dan persepsi dari kerangka berpikir yang menggunakan hasil telaahan nasional oleh para pengambil kebijakan luar negeri.

Basis dari kerangka berpikir terkait restrukturisasi kebijakan luar negeri ini juga tentunya juga nantinya akan dikaitkan dengan bagaimana penulis mengoperasionalkan area konvergensi yang di bahas pada bab penelitian sebelumnya. Ketiga elemen area konvergensi tersebut dapat dilihat di **gambar 5** pada penelitian ini. Adapun ketiga elemen tersebut untuk menjadi acuan berpikir juga dalam memahami *process tracing* polugri Indonesia dari masa ke masa hingga pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo dalam studi kasus keanggotaan tidak tetap DK PBB Indonesia adalah: (1) Otonomi kebijakan luar negeri suatu negara dalam mengelola pergaulan internasionalnya; (2) Dinamika ancaman dan kerja sama terhadap isu kawasan, yang di mana regionalisme merupakan identitas erat polugir negara *middle power*; dan (3) Politik domestik dan faktor kepemimpinan suatu negara, di mana elemen ini akan berfokus pada interaksi para aktor negara. Ketiga area konvergensi ini akan terintegrasi dengan pembahasan pada bagian selanjutnya pada bab ini dalam memahami restrukturisasi kebijakan luar negeri Indonesia baik dalam konteks *process tracing* maupun pada saat Indonesia menjadi anggota tidak tetap di DK PBB tahun 2019 – 2020. Dalam konteks ini, maka penting untuk kita meninjau baik secara historis, strategis, maupun empiris perkembangan polugri dari pemimpin ke pemimpin sebelum Presiden Joko Widodo seperti yang dijelaskan sebelumnya, untuk memberikan basis dan untuk memberi batasan – batasan pada konteks penelitian ini.

Hino Samuel Jose, 2022

***QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI
RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN
KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

B. Process Tracing Karakter Perubahan Kebijakan Luar Negeri Indonesia Sepanjang Hassan Wirajuda dan Menlu Marty Natalegawa

Process tracing sesuai judul dari sub bagian bab penelitian ini akan berfokus pada era kepemimpinan Menlu Hassan Wirajuda dan Menlu Marty Natalegawa saja sebab untuk era Menlu Retno Marsudi akan integral dengan bagian pembahasan konteks utama dari unit analisis penelitian ini yaitu restrukturisasi kebijakan luar negeri Indonesia di DK PBB pada era Presiden Joko Widodo. Adapun elaborasi pada bagian ini penting mengingat dalam rangka untuk membahas proses restrukturisasi Kebijakan Luar Negeri Indonesia di era Presiden Joko Widodo, penting untuk tidak meninggalkan era kepemimpinan sebelumnya yang berkontribusi dalam mendewasakan polugri Indonesia dari waktu ke waktu. Dalam hal ini analisis perubahan karakter kebijakan luar negeri yang di bahas pada bagian ini juga menekankan pada elaborasi terkait identitas polugri *middle power* Indonesia dan faktor – faktor yang mempengaruhi restrukturisasi kebijakan luar negeri Indonesia. Adapun klasifikasi peran *middle power* disini yang digunakan adalah klasifikasi yang digunakan oleh Hidayatullah (2017) terkait peran negara *middle power* sebagai *advocator*, *assembler*, dan *enforcer*.

1. Menlu Hassan Wirajuda (Era Presiden Megawati – SBY, 2001 - 2009)

Pada era ketika Hassan Wirajuda ketika menjadi Menlu RI, di mana di era kepemimpinan beliau sebagai Menlu di masa pemerintahan Presiden yang berbeda – beda, beliau fokus pada bagaimana membangun kebijakan luar negeri dengan proses pendewasaan Indonesia sebagai negara demokrasi, membangun rezim dan institusi serta mendorong pembentukan pilar komunitas ASEAN dan berbagai basis penting lainnya. Pada era Bapak Menlu Hassan Wirajuda, Indonesia fokus pada bagaimana agar demokrasi dapat menjadi instrumen yang memiliki legitimasi yang kuat, dan dapat memperbaiki citra Indonesia dan terwujud dalam berbagai forum penting seperti *Bali Democracy Forum* dan pembentukan mekanisme ASEAN seperti *ASEAN Inter Governmental Commission on Human Rights* (AICHR) (Sukma, 2011). Sikap seperti

Hino Samuel Jose, 2022

QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

ini memiliki proposisi yang sama seperti apa yang sebelumnya menjelaskan bahwa preferensi kebijakan luar negeri akan senantiasa berubah apabila aktor negara memiliki keinginan baru untuk melakukan redefinisi dan membangun identitas barunya (Saideman, 2002). Preferensi kebijakan luar negeri yang lebih demokratis dibangun pada era Menlu Hassan Wirajuda menempatkan narasi demokrasi sebagai sesuatu yang integral dengan kebijakan luar negeri Indonesia dan terus menempatkan hal tersebut sebagai *desire* Jakarta di level multilateral. Menlu Hassan menggunakan narasi strategis yang menggambarkan demokrasi sebagai tantangan global dan persyaratan untuk tumbuh dan terus mendorong demokratisasi sistem internasional melalui tata kelola yang baik, Islam, transisi pembangunan nasional, dan stabilitas melalui dialog, diskusi, *rule of law*, dan penerimaan konsep demokrasi yang bersifat lebih universal untuk seluruh negara (Grzywacz, Democracy in Indonesian Strategic Narratives: A New Framework of Coherence Analysis, 2020). Sentimen ini jugalah yang menjadi cerminan perilaku Indonesia untuk memperoleh status *middle power* karena pada saat itu diplomasi Indonesia mengalami restrukturisasi pasca orde baru (*middle power status-seeking behaviour*) yang salah satunya termasuk untuk menciptakan pengaruh lebih besar di kawasan dan level global yang lebih luas.

Menlu Hassan Wirajuda juga melakukan manifestasi perubahan struktur kebijakan luar negeri Indonesia melalui kerangka kelembagaan pemerintah pada institusi Kementerian Luar Negeri yang merupakan ujung tombak penyelenggaraan hubungan luar negeri Indonesia. UU Hubungan Luar Negeri mengatur Kemlu RI sebagai penjurur, dan sebagai institusi, Menlu Hassan melihat pentingnya reformasi kerja Kemlu. Reformasi dilakukan untuk perubahan struktur koordinasi intra Kemlu agar lebih fokus pada pendekatan regional ketimbang pendekatan tematik (perubahan satuan kerja dari yang contoh: Direktorat Jenderal Politik, Kerja Sama Ekonomi Luar Negeri, Sosial Budaya dan Informasi, dan lainnya menjadi Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Amerika dan Eropa, serta Kerja Sama Multilateral, Informasi dan Diplomasi Publik dan Kerja Sama ASEAN); Adapun studi sebelumnya menyatakan

Hino Samuel Jose, 2022
***QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI
RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN
KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

bahwa reformasi institusional Kemlu harus dilakukan sebagai bagian dari pada semangat reformasi pasca orde baru yang terus diperkuat pemerintah yang juga dilakukan sebagai usaha untuk mendorong revitalisasi kekuatan politik luar negeri Indonesia di ASEAN di era Kemlu yang lebih sipil dan tidak lagi mengandung unsur manajemen dan kelembagaan sisa orde baru (Nabbs-Keller, 2013).

Kemudian, dalam masa kepemimpinan Menlu Hassan Wirajuda, termasuk pada saat Indonesia menjabat menjadi anggota tidak tetap DK PBB pada tahun 2007 – 2008, Indonesia melakukan restrukturisasi kebijakan luar negeri agar Indonesia memperoleh kontrol yang lebih luas dalam domain penyusunan kebijakan luar negeri tanpa harus melalui konsultasi DPR, di mana Menlu Hassan mengarahkan agar posisi Indonesia di DK PBB, seperti pada isu sanksi nuklir Iran dapat di ambil tanpa harus konsultasi dengan basis UU No. 37 tahun 1999 saat itu yang tidak mewajibkan Kemlu untuk berkonsultasi dengan DPR; yang pada saat itu juga, Indonesia harus mempertimbangkan posisi negara P5 dan tarik ulurnya dengan posisi Indonesia dalam skenario pro resolusi dan kontra resolusi pengetatan sanksi Iran tersebut (Setiawan & Yani, 2019). Hal ini menurut penulis merupakan aksi restrukturisasi dengan tujuan untuk memperkuat birokratisasi operasi hubungan luar negeri yang dijalankan oleh *designated actor* dalam kasus ini diplomat, dan tidak dengan konsultasi dengan pihak parlemen yang tidak sepenuhnya memiliki keahlian diplomasi dan dengan posisi parlemen yang sangat partisan. Studi sebelumnya membahas perilaku aktor pengambil keputusan kebijakan luar negeri seperti ini sebagai demonstrasi/ wujud dari area kebijakan yang memang niscaya di administrasikan oleh Menlu yang memiliki otoritas formal dalam menentukan kebijakan luar negeri (Hill, 2003).

Seperti yang kita ketahui, bahwa restrukturisasi kebijakan luar negeri, berdasarkan pada analisis konvergensi di bab sebelumnya, melibatkan faktor kepemimpinan suatu negara beserta dengan bagaimana suatu pemimpin melihat suatu isu yang dihadapi negaranya. Seperti yang dibahas pada bab sebelumnya, bahwa negara *middle power* menaruh perhatian lebih pada isu – isu langsung yang dihadapinya di

Hino Samuel Jose, 2022
***QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI
RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN
KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

kawasan, dan telah terbukti di mana kata kunci “isu kawasan” tercermin dalam analisis konvergensi yang disusun di bab sebelumnya pada penelitian ini. Isu kawasan menjadi bagian dari *role conception* negara *middle power* dan akan terus menjadi muatan kebijakan luar negerinya di tengah keterbatasannya kapabilitasnya dalam sistem internasional (Cooper, 2017; Easley, 2012; Teo, 2021; Hidayatullah, 2017; Jordaan, 2003), hal ini pula yang terjadi pada era Menlu Hassan, di mana Indonesia secara aktif melakukan restrukturisasi kebijakan luar negeri untuk menempatkan personil diplomasi dalam tataran lingkaran eksekutif pemerintahan. Karena faktor kepemimpinan tadi yang kita ketahui korelasinya dengan konteks restrukturisasi tadi, maka restrukturisasi yang dilakukan pada era Hassan seperti penempatan personil Kemlu di Kemenko Polhukam dan kementerian lain, termasuk di lingkaran Dewan Pertimbangan Presiden dan Sekretariat Presiden di Istana Negara terus dilakukan Menlu Hassan untuk menciptakan proses penyelenggaraan kebijakan luar negeri yang *top down* serta lebih konsultatif pasca era orde baru runtuh dengan semangat reformasi. Hal ini tentu dilakukan dalam rangka untuk mendukung pengambilan dan penyusunan keputusan serta kebijakan strategis untuk hadapi situasi kawasan di ASEAN melalui mekanisme koordinasi yang secara strategis tetap menjaga kontrol kekuasaan dan keberlanjutan polugri dalam domain kekuasaan eksekutif Presiden dengan Menlu secara bilateral, seperti penasehat kebijakan untuk memberikan masukan ke Presiden pada isu – isu penting saat itu di kawasan seperti: pelaksanaan kebijakan dalam pilar komunitas ASEAN; isu strategis terkait konflik Laut Cina Selatan, promosi demokrasi di Asia Pasifik, dan lainnya . Hal ini penting mengingat isu tersebut dihadapi oleh Indonesia dan negara ASEAN lainnya di tengah pesatnya pertumbuhan ASEAN dalam menyempurnakan kerangka kerja normatif dan tataran idenya sebagai fundamental dari penyelenggaraan kebijakan luar negeri Indonesia di ASEAN dan operasionalisasi kerja sama ASEAN hingga saat ini dalam navigasinya untuk menyelesaikan isu kompleks di kawasan termasuk apa yang didorong Indonesia sebagai norma melalui keanggotaannya di DK PBB pada tahun 2007 – 2008.

Hino Samuel Jose, 2022

QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Menlu Hassan Wirajuda dari tahun 2001 hingga 2009 di bawah Presiden Megawati dan SBY yang di mana kebijakan luar negeri Indonesia saat itu mengalami reformasi besar – besaran sebagai suatu polugri yang berkembang dengan muatan nilai demokrasi yang semakin dewasa. Bahkan dalam memuat nilai demokratis tersebut, pada era Hassan sendiri, polugri Indonesia menempatkan pendekatan Islam yang *Rahmatan Lil Alamin* sebagai salah satu definisi norma tetap yang menjadi promosi Indonesia, dikarenakan pada waktu itu berbagai kejadian seperti terorisme di berbagai negara dan 9/11 serta kondisi perang dan konflik di beberapa negara mayoritas Muslim seperti Irak, Afghanistan, Suriah, dan konflik Israel Palestina menjadi perhatian khusus bagi Indonesia. Di bawah Menlu Hassan, Indonesia bergerak menjadi *norm entrepreneur* dari norma ide dan instrumental untuk mempromosikan nilai Islam moderat melalui cara formal – informal serta trek 1 dan trek 2 diplomasi untuk membangun simbiosis mutualisme dari mekanisme dialog tersebut untuk memperkenalkan citra Islam moderat ke tataran global oleh Indonesia (Purwono, 2017). Ketiadaan nilai moral dan moderasi Islam pada masa pemerintahan sebelumnya *vis-a-vis* era orde baru membuat integrasi nilai moderasi Islam merupakan tonggak bersejarah restrukturisasi kebijakan luar negeri Indonesia dalam menghadapi gelombang tantangan keamanan global dari ancaman terorisme dan konflik pada waktu itu, yang di mana hal ini diteruskan hingga ketika Presiden SBY mulai menjabat pada tahun 2004 memanfaatkan narasi Indonesia sebagai negara mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia (Anwar, 2010; Purwono, 2017).

Selain itu, kebijakan luar negeri Indonesia dimulai dari pada era Megawati juga memiliki aspek transaksional yang kuat, di mana Presiden Megawati mengikuti gaya kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid yang memiliki intensitas kunjungan luar negeri yang tinggi namun sayang sikap polugri Indonesia cenderung konservatif namun tergoyahkan dengan perdebatan masalah *sense of crisis* nasional yang terjadi akibat lengsernya Abdurrahman Wahid (Pratiwi, 2015). Apabila juga berbicara dalam tataran kerangka ide yang terbentuk dari landasan geopolitik, Indonesia juga pada era Hassan

Hino Samuel Jose, 2022

QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

terus memperdalam usaha untuk memajukan kerja sama di kawasan dan penguatan manifestasi konkret kebijakan *outward looking* Indonesia pada Presidensi SBY. Menlu Hassan pada saat kemudian kembali meneruskan tugasnya pada era Presiden SBY terus mendorong agar polugri tidak semata-mata tindakan transaksional, namun menjadi suatu kebijakan luar negeri yang bersifat sebagai diplomasi total dan di waktu bersamaan meningkatkan kemitraan strategis bersama para aktor negara yang berlokasi dalam lingkaran konsentris lapisan kedua polugri Indonesia. Adapun yang termasuk dalam lingkaran konsentris lapisan kedua ini sendiri adalah negara yang berlokasi di Asia Tenggara, Pasifik, dan Asia Timur) serta juga mendorong pembentukan norma dan rezim turunan untuk mengatur kestabilan kawasan dalam tataran ide dan advokasi negara berkembang melalui Konferensi Asia Afrika (KAA), Gerakan Non Blok (GNB), ASEAN, dan pendalaman usaha *balancing* dalam menjaga keseimbangan dinamis di kawasan menjadi modalitas utama diplomasi total di lingkaran konsentris ini (Haryanto, Prinsip Bebas Aktif Dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia: Perspektif Teori Peran, 2014).

Dapat dikatakan bahwa restrukturisasi kebijakan luar negeri yang terjadi pada era kepemimpinan Hassan Wirajuda merupakan *benchmark* daripada basis politik luar negeri Indonesia di era modern ini. Pada era SBY di kepemimpinan Menlu Hassan terutamanya, pelaksanaan hubungan luar negeri Indonesia begitu memperdalam peran Indonesia dalam formulasi/ pembentukan rezim – rezim penting yang terus relevan hingga konteks politik luar negeri saat ini. Contohnya adalah: peran aktif Indonesia dalam penyusunan struktur pilar ASEAN, *Bali Concord II*, *Treaty of Amity and Cooperation*, menjalin aktif pembentukan mekanisme ASEAN lainnya seperti AICHR, *East Asia Summit*, peningkatan/ penambahan mitra dialog eksternal ASEAN, memulainya pembahasan – pembahasan isu penting dalam tahap awal pada konteks Laut Cina Selatan pasca meredanya konflik Kamboja, dan bagaimana Indonesia melalui politik bebas aktif berjalan di antara dua terumbu karang. Istilah ini sangat kuat dan menjadi salah satu norma yang di bahas oleh Menlu Hassan dalam berbagai

Hino Samuel Jose, 2022
***QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI
RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN
KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

kesempatan hingga tahun pada penelitian ini di susun. Pada era kepemimpinan SBY c.q. Menlu Hassan, Kementerian Luar Negeri sebagai institusi penjuror di pemerintahan yang berfokus pada pelaksanaan politik luar negeri mengalami reformasi dan penyegaran organisasi secara besar – besaran serta menyusun tulang rusuk upaya diplomasi yang lebih total (Wiranata, 2014). Indonesia menjadi salah satu katalisator di ASEAN yang juga terus mengedepankan prinsip non intervensi yang dicanangkan dalam piagam ASEAN yang dalam prosesnya juga disadari Indonesia sebagai suatu urgensi penting. Prinsip non intervensi yang tertuang di piagam ASEAN sendiri dalam perspektif restrukturisasi kebijakan luar negeri Indonesia merupakan hasil pemikiran Indonesia di mana sebagai negara yang berdaulat, belajar dari era kolonialisme dan dari kepentingan demokrasi, untuk meningkatkan otonomi negara dalam mengelola hubungan luar negerinya tanpa tekanan *great power* pada era pasca perang dingin (atau dalam istilah Menlu Hassan, berlayar di antara dua terumbu karang). Hal ini dalam studi sebelumnya dibahas sebagai suatu keniscayaan negara berdaulat di era yang baru (Spiegel, 1995) dan dalam hal ini merupakan sebuah paham kemerdekaan dan derajat yang sama dalam bergaul, yang di mana dalam studi sebelumnya menurut Amitav Acharya, sebagai salah satu prinsip/ alasan dasar dalam pembentukan komunitas politik keamanan di ASEAN (Acharya, *Constructing a Security Community in Southeast Asia: ASEAN and the Problem of Regional Order*, 2001). Dari pembahasan ini, kemudian dapat disimpulkan tiga hal penting yang menjadi kunci dari *outlook* restrukturisasi kebijakan luar negeri Indonesia pada era Menlu Hassan seperti yang tergambar di bawah ini.

**Gambar 7. Piramida Kerangka Berpikir Terkait Restrukturisasi Kebijakan
Luar Negeri Indonesia pada Era Menlu Hassan Wirajuda
(Presiden Megawati – SBY, 2001 – 2009)**

Hino Samuel Jose, 2022

***QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI
RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN
KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]



Sumber: Diolah oleh penulis.

Pertama, politik luar negeri Indonesia pada era Menlu Hassan *role conception* politik luar negeri Indonesia masih berkaitan dengan perilaku Indonesia yang masih mencari statusnya di era tatanan global pasca perang dingin dan terus dipertahankan hingga akhir jabatannya. Memang sekilas kita bisa melihat bahwa prinsip bebas aktif sendiri terbentuk karena pelajaran dan realita pahit yang Indonesia ambil pasca perang dingin, serta trauma berat dari Indonesia akan kolonialisasi dan imperialisasi. Menurut penulis, pada era Megawati, polugri Indonesia yang disetir oleh Hassan Wirajuda masih fokus pada pembenahan struktur institusional domestik dalam rangka mempersiapkan *role conception* apa yang ingin diambil Indonesia sebagai negara demokrasi yang bertumbuh. Penulis beranggapan bahwa pada era Megawati, posisi *middle power* Indonesia belum secara utuh direfleksikan. Mulai pada masa Presidensi SBY pada tahun 2004 – 2009 Indonesia menurut penulis sudah mulai membangun proses *role conception* yang di mana Indonesia akan memilih modalitas dan identitas apa yang dibangun. Untuk menjawab apa saja modalitas dan identitas apa yang dibangun, penulis berargumentasi bahwa Indonesia melalui Menlu Hassan pada masa

Hino Samuel Jose, 2022

QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Presidensi SBY sudah mulai mengambil posisi sebagai *middle power* yang memperdalam peran sebagai *enforcer* dalam identitasnya dan terus memulai membangun jembatan (*bridge building*). Penulis berargumen demikian dikarenakan Indonesia sudah mulai aktif berpartisipasi dan menyusun instrumen – instrumen dasar yang berkaitan dengan aspek politik dan keamanan ASEAN. Diadopsinya piagam ASEAN pada 15 Desember 2008 menjadi salah satu hasil kerja positif Indonesia yang terus mendorong proses pembangunan komunitas ASEAN. Identitas ini menjadikan Indonesia tidak lagi sebuah negara demokrasi muda yang belum memiliki tataran ide dan kerangka kebijakan yang kuat, dan sudah dapat diperhitungkan sebagai negara demokrasi yang lebih dewasa dan idealisme serta yakin dengan visi luar negerinya. Studi sebelumnya meyakinkan kembali argumentasi ini karena ASEAN merupakan *cornerstone* dan Indonesia berkontribusi dalam memperdalam kerja sama ASEAN dengan mitra strategisnya yaitu Tiongkok dan Amerika Serikat melalui pendalaman kerja sama politik ekonomi seperti melalui *ASEAN – China Dialogue* (ACD), *East Asia Summit* (EAS), *ASEAN +3*, *ASEAN Regional Forum* (ARF), *Asia Pacific Economic Community* (APEC), dan perjanjian turunan lain dalam bidang yang lebih luas dari polkam seperti *ASEAN – China Free Trade Agreement*, *ASEAN, Indonesia – United States Comprehensive Strategic Partnership* (12 subjek terkait kerja sama polkam dan 27 subjek terkait kerja sama ekonomi), serta *Declaration of Conduct on South China Sea* yang menjadi beberapa instrumen penting yang menandai berkembangnya keinginan dan ambisi Indonesia di bawah kebijakan luar negeri yang melihat keluar (Wnukowski, 2015). Lebih lanjut, studi tersebut menegaskan bahwa baik kerja sama polkam maupun ekonomi dilakukan sebagai usaha untuk memudahkan Indonesia agar dapat secara langsung mendekati kedua negara baik AS dan Tiongkok untuk memperlancar usaha Indonesia mempromosikan citra dan kepemimpinannya di kawasan sambil melakukan tindakan preventif agar tidak ada ketidakstabilan dari salipan salah satu *major power* tanpa harus melalui usaha *hard power*. Upaya *counterbalancing* ini menurut penulis diakali sebagai salah satu usaha *middle power*

Hino Samuel Jose, 2022

***QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI
RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN
KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Indonesia untuk menggunakan Tiongkok dan AS sebagai bahan untuk memperkuat pengaruh dan posisi Indonesia di kawasan (Wnukowski, 2015).

Kemudian terkait modalitas, tentunya ketika bicara modalitas, tentunya yang pertama, Indonesia memiliki modalitas yang kuat akan posisinya di kawasan, di mana Indonesia terus mendorong integrasi kawasan sambil memperkuat orientasi kebijakan luar negeri regional yang dari waktu ke waktu secara bertahap ditujukan untuk mereformasi tatanan internasional dengan prinsip yang Indonesia usung sambil melakukan konstruksi identitasnya sebagai *middle power*. Hal ini sejalan dengan apa yang dibahas oleh studi sebelumnya terkait perbedaan khusus antara *emerging* dan *middle power* yang bersifat tradisional (Jordaan, 2003). Untuk poin pertama ini, berdasarkan gambar 7, bahwasannya *role conception* ini adalah aspirasi Indonesia dari arah luar (lingkungan eksternal) ke dalam negeri, yang kemudian menjadi dimensi dari apa yang menimbulkan restrukturisasi kebijakan luar negeri Indonesia sebagai *middle power* dengan identitas sebagai *enforcer* dan modalitas kekuatan dan instrumen yang dibangun dari level kawasan. Dari luar disini berarti bahwa Indonesia melihat situasi global pasca perang dingin, dan kemudian mempromosikan Gerakan Non Blok dan membawanya ke ASEAN atas dasar tersebut, yang tentunya penting karena kita tidak lagi bicara kompetisi komunisme versus liberalisme yang menjadi motivasi cikal bakal terbentuknya ASEAN, tetapi sudah ada pembicaraan bagaimana negara mana ikut *major power* siapa dalam formulasi poligrinya.

Kedua, politik luar negeri Indonesia pada era Hassan Wirajuda sendiri dilakukan dengan suatu penegasan bahwa *norm entrepreneurship* yaitu maksudnya adalah Indonesia menjadi *lead* dan inisiator penting bagi negara dunia bahwa suatu negara non blok tetap bisa memposisikan dirinya secara strategis bagi percaturan global. Penulis menyatakan bahwa Indonesia berusaha untuk *setting the example* atau menjadi percontohan, dan hal ini penting karena ASEAN dan *middle power* di kawasan pada saat itu masih berada dalam dilema yang cukup sulit posisinya dalam menanggapi ajakan maupun tekanan salah satu *major power* untuk *bandwagoning* bersama. Apabila

Hino Samuel Jose, 2022

***QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI
RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN
KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

kita bicara ASEAN contohnya, pada masa pemerintahan SBY dan Megawati, kawasan *mainland* ASEAN belumlah cukup stabil, di mana isu Myanmar dan Kamboja masih menjadi perhatian khusus, serta posisi ekonomi negara Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam (CLMV) yang masih terklasifikasi sebagai *Least Developing Countries* (LDCs). Untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di negara ASEAN daratan utama tersebut, Indonesia dalam hal ini menjadi *norm entrepreneur* yang dalam studi sebelumnya di definisikan sebagai suatu aktor yang berhasil melakukan difusi, mendirikan, ataupun memperkuat suatu norma (Wunderlich, 2020).

Indonesia dalam hal ini memperkuat norma yang menjadi modalitas dan identitas ASEAN sebagai organisasi kawasan yang terus mencari kesempatan untuk bekerja sama, melakukan *hedging* terhadap negara *major power* sambil di waktu bersamaan meminimalisir kerumitan dan dilema hubungan luar negerinya. Hal ini senada dengan studi sebelumnya yang menjelaskan posisi Indonesia dan Malaysia sebagai *middle power* yang terus melakukan *hedging* di tengah duel unipolaritas dan multipolaritas sistem internasional melalui hubungan luar negeri yang baik dan konstruktif (Burton, 2021). Contoh konkret terkait argumen ini sebenarnya sudah disinggung pada penjelasan diatas, yaitu dengan ekspansi hubungan antar kawasan ASEAN dengan mitra dialog eksternalnya seperti Rusia, Amerika Serikat, dan Tiongkok sebagai tiga negara yang saat ini menurut penulis cukup menjadi sorotan komunitas internasional dalam konteks percaturan politik global. Apabila ada pertanyaan, mengapa *norm entrepreneur* menjadi suatu istilah yang menjadi bahasan penulis, maka jawabannya yaitu terletak pada studi sebelumnya, di mana negara – negara yang sadar akan rasionalitas polugri dan keterbatasan *hard power* mereka tentu membutuhkan modalitas dalam mendorong identitasnya sebagai *middle power*. Hal ini di bahas pada penelitian tersebut sebagai usaha untuk memainkan peran melalui model hubungan luar negeri alternatif yang menggunakan kekuatan sosial suatu negara pada dimensi isu resolusi konflik, poliik, dan pembangunan di sistem internasional serta

Hino Samuel Jose, 2022

QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

merupakan suatu istilah yang mampu menjelaskan efek independen dari suatu norma pada konteks politik internasional (Ingebritsen, 2002).

Ketiga, politik luar negeri Indonesia pada era Menlu Hassan Wirajuda, fokus pada era pemerintahan SBY, masuk pada konteks yang lebih teknis dan hal ini diwujudkan dalam berbagai aktivitas multilateral yang diusung Indonesia untuk mempromosikan demokrasi setelah Indonesia sendiri demokratisasinya sudah cukup dewasa dan matang untuk bangsa Indonesia mengambil peran yang lebih luas. Selain daripada manifestasi yang lebih teknis seperti pada forum *Bali Democracy Forum*, beberapa inisiatif yang lain juga di dorong Indonesia seperti pembahasan konflik Palestina pada saat keanggotaan Indonesia di DK PBB pada tahun 2007 – 2008 di mana Presiden SBY menegaskan melalui surat kepada Sekjen PBB dan Presiden DK PBB saat itu agar tindakan Israel dikecam dan mendorong agar DK PBB menerbitkan *Presidential Statement* serta resolusi S/RES/1850 pada tahun 2008 yang juga membahas isu Palestina dan Israel. CEAPAD juga menjadi salah satu modalitas yang digunakan Indonesia, dan Presiden SBY melalui Menlu Hasan Wirajuda juga berpartisipasi pada pertemuan di mekanisme GNB yang di mana pada tahun 2008 GNB berhasil mengeluarkan beberapa dokumen penting terkait Palestina yaitu: NAM Ministerial Conference Final Document (Juli 2008, terkait isu Palestina dan Yerusalem); NAM XV Ministerial Conference Final Declaration (Juli 2008, terkait isu kebebasan mobilisasi, blokade, dan peta jalan situasi di Golan dan Gaza serta para pengungsi); dan komunikasi bilateral dengan Palestina terkait rekonsiliasi Hamas dan *Palestine Liberation Organization* (PLO) yang di mana Presiden Abbas dari Palestina berkunjung ke Indonesia pada 2007 untuk membahas rekonsiliasi domestik Palestina pasca pemilu yang memenangkan Hamas dan mengalahkan PLO (Satrio, 2019).

Tentu tekanan yang dihadapi oleh Indonesia cukup rumit karena Hamas banyak ditentang oleh negara barat dan ada polarisasi yang kuat terkait posisi yang melibatkan isu Hamas. Selain itu juga secara unilateral Indonesia sesaat setelah memenangkan pemilu pencalonan anggota tidak tetap DK PBB pada tahun 2006 menaruh prioritas

Hino Samuel Jose, 2022

***QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI
RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN
KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

penting pada isu keamanan di Asia mempertimbangkan posisi khas Indonesia seperti pada isu Myanmar, Korea Utara, Iran, dan Timur Tengah di mana semua isu ini menekankan pada pentingnya demokrasi sebagai tata laksana resolusi konflik¹. Kesimpulan ini tentu menjadi dasar pemahaman kita bersama akan ilustrasi di atas yang secara basis historisnya terbentuk pasca era perang dingin. Pertumbuhan diplomasi Indonesia yang semakin dewasa di bawah era Menlu Hassan Wirajuda pada masa pemerintahan SBY dapat diartikan dalam tiga hal: (1) Indonesia terus mengedepankan cara untuk melihat dari luar ke dalam untuk membangun fondasi kebijakan luar negeri pada era Megawati yang bertransisi ke era yang melihat dari dalam keluar dengan kesiapan modalitas dan instrumen diplomasi Indonesia; (2) Indonesia mampu menjadi pembangun jembatan di tengah rawannya goyangan akan demokrasi di negara – negara ASEAN yang masih dihantui oleh kasus Myanmar dan Kamboja; dan (3) Indonesia menggunakan perannya sebagai *enforcer* melalui berbagai lini forum multilateral sebagai bagian dari konstruksi realita kebijakan luar negeri Indonesia yang sangat pragmatis dan mengedepankan segmentasi aktor polugrinya berdasarkan lingkaran konsentris. Ketiga hal ini menjadi basis ketika kita melanjutkan analisa *process tracing* ke administrasi negara yang berikutnya.

2. Menlu Marty Natalegawa (Era Presiden SBY, 2009 – 2014)

Kemudian dilanjutkan pada era Menlu Marty Natalegawa, yang terus mengedepankan kebijakan luar negeri Indonesia yang *outward looking* atau melihat keluar. Pada masa pemerintahan SBY di era Marty Natalegawa, terdapat banyak usaha yang mempromosikan Indonesia sebagai negara demokrasi yang bertumbuh dan sebagai aktor pemimpin di kawasan. Menlu Marty Natalegawa sendiri di kenal dengan

¹ Pernyataan ini diberikan pada pernyataan pers Juru Bicara Presiden RI Bapak Dino Patti Djalal pada tahun 2006, arsip dikutip dari Direktorat Politik dan Keamanan Kementerian PPN/ Bappenas [http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Politik%20Luar%20Negeri/3\)%20Keanggotaan%20Indonesia%20dalam%20Organisasi%20Internasional/2\)%20PBB/Keanggotaan%20RI%20Dalam%20DK%20PBB/RI%20menjadi%20anggota%20UNSC.pdf](http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Politik%20Luar%20Negeri/3)%20Keanggotaan%20Indonesia%20dalam%20Organisasi%20Internasional/2)%20PBB/Keanggotaan%20RI%20Dalam%20DK%20PBB/RI%20menjadi%20anggota%20UNSC.pdf)

Hino Samuel Jose, 2022

QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

pola pemikiran akademiknya yang kuat, sehingga setiap tataran normatif dan aspek strategis dalam kerja sama dan hubungan luar negeri Indonesia pada era SBY banyak di delegasikan dan diberikan otonomi yang cukup besar kepada Menlu Marty Natalegawa dalam melakukan navigasi arah polugri yang *outward looking*. Untuk basis dasar penjelasan pada bagian ini secara khusus, penulis ingin terlebih dahulu mengutip apa yang disampaikan oleh penelitian sebelumnya, bahwa kebijakan luar negeri Indonesia di era Presiden SBY menjabat periode kedua sangatlah menekankan pada aspek implementasi konkret dengan apa yang sudah ditanamkan pada era Megawati (Inayati, 2005). Walaupun demikian, penulis ingin menambahkan bahwa walaupun memang SBY melanjutkan apa yang dilakukan Megawati, namun polugri di era Presiden SBY tidaklah bersifat transaksional dan sudah mulai melakukan *fundamental firming* atau penegasan posisi Indonesia dan pendirian fundamental pada urgensi Pemri untuk mengambil tindak lanjut dan menjadi *lead* dalam berbagai lini terutama dalam isu politik dan keamanan. Latar belakang Menlu Marty Natalegawa sangatlah kuat dari segi akademik, dan penelitian ini meyakini hal inilah yang membuat Menlu Marty juga menaruh fokus pada bagaimana diplomasi *middle power* Indonesia dapat dijalankan untuk mengelola kompetisi para *major power*.

Menlu Marty memiliki fokus akademik pada hal tersebut yang menempatkannya sebagai aktor yang berpengaruh dalam proses restrukturisasi kebijakan luar negeri Indonesia. Hal ini dikarenakan Menlu Marty, sesuai apa yang dibahas pada bab empat, mempunyai pemahaman pada tingkat kompleksitas tertentu terkait dinamika kerja sama dan bagaimana mewujudkan otonomi pengelolaan kebijakan luar negeri Indonesia di era rivalitas global. Dalam bukunya “*Does ASEAN Matter: a View from Within*”, Menlu Marty menyatakan pandangannya bahwa konsolidasi kesatuan ASEAN, kepercayaan strategis, kemampuan ASEAN untuk mengelola pergeseran geopolitik dan ekonomi, serta penyelesaian masalah perbatasan menjadi fokus yang masih akan relevan bahkan hingga 50 tahun kedepan (Natalegawa, 2018). Penulis dengan ini menyatakan, bahwa kita dapat melihat suatu visi yang

Hino Samuel Jose, 2022
***QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI
RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN
KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

ditanamkan yang kemudian berujung pada cukup kuatnya delegasi tugas pengelolaan kebijakan luar negeri oleh Presiden SBY kepada Menlu Marty. Lebih lanjut, dalam mengukur bagaimana dan sejauh apa Indonesia dapat melakukan konsolidasi *power* untuk restrukturisasi kebijakan luar negerinya dalam situasi paradigma kebijakan yang berorientasi ke isu kawasan, penting bahwa perlu ada pengukuran dan pembedaan arus kekuatan baik melalui basis sumber daya (*resource-based*) maupun berbasis pengaruh (*influence-based*), yang di mana hal ini merupakan apa yang dikaji oleh studi sebelumnya yang juga membagi kedua arus utama pengukuran kekuatan ini ke dalam indikatornya masing – masing (Jatmiko, 2021).

Penelitian terdahulu menyatakan, bagi *middle power* untuk melihat konteks politik domestik yang menilai bahwa negara dengan sebuah konsensus yang terbangun pada level domestik terkait kebijakan luar negerinya akan sulit berubah dibanding negara yang konteks politiknya berorientasi pada konflik. Perlu diketahui pada era Marty Natalegawa, Indonesia juga fokus pada promosi toleransi, menjaga perdamaian, dan penyesuaian prioritas nasional yang cenderung di pengaruhi oleh isu partisan di parlemen dan bagaimana semua pihak memiliki pandangan yang sama (Grzywacz & Gawrycki, 2021). Konsensus konteks politik domestik Indonesia sendiri sudah sangat jelas, yaitu bebas aktif, yang berarti apabila kita berpikir seperti apa yang disimpulkan pada penelitian Grzywacz dan Gawrycki (2020) bahwa Indonesia akan lebih sulit untuk melakukan restrukturisasi. Namun, penulis ingin sedikit mengajukan keberatan akan pandangan ini, di mana menurut penulis, walaupun keberadaan konsensus pada politik domestik Indonesia sangat kuat, masih ada ruang gerak yang lebih luas untuk Indonesia melakukan restrukturisasi kebijakan luar negerinya. Buktinya adalah, pada era Menlu Marty di bawah Presiden SBY, Indonesia secara leluasa mampu memilih kapan menggunakan pendekatan *megaphone diplomacy* (diplomasi megafon yang keras dan didengar semua pihak) dan kapan untuk menggunakan *silent diplomacy* (diplomasi diam-diam).

Hino Samuel Jose, 2022

QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Contohnya adalah ketika ASEAN gagal mengeluarkan komunique bersama terkait sengketa Laut Cina Selatan pada tahun 2012, Menlu Marty melakukan manuver *silent diplomacy* yang termanifestasikan dalam bentuk kunjungan kerja Menlu Marty ke beberapa negara ASEAN. Hal tersebut juga dilakukan pada penyelesaian isu Myanmar yang juga sedang bergulir saat itu tatkala waktu itu konflik Myanmar belum melebar hingga seperti *status quo* tahun 2022 ini, namun masih bersifat konflik komunal (Burhani, 2010). Manuver dari *silent* ke *megaphone diplomacy* juga dilakukan ketika Indonesia secara aktif mendorong penyelesaian isu terorisme yang mewabah di tanah air melalui kerja sama dengan Australia pada pendirian *Jakarta Center for Law Enforcement Cooperation* (JCLEC) di Semarang bahkan juga di kombinasikan dengan pendekatan represif dan bekerja sama dengan PBB dalam forum pembahasan isu terorisme.

Kemudian, lebih lanjut masih dalam konteks restrukturisasi kebijakan luar negeri, Indonesia dalam kepemimpinan SBY melalui Menlu Marty terus mendorong pendekatan konstruktif ketimbang pendekatan yang koersif. Hal ini pada isu Myanmar contohnya, Indonesia harus melakukan penyesuaian posisi nasionalnya dengan mendorong materialisasi keinginan Indonesia untuk mendorong konsolidasi di internal Myanmar sambil mendorong *ASEAN Way* dan dialog antar negara untuk membangun pendekatan konstruktif dan sinergi seperti melalui BDF, hasil kajian *Institute for Peace and Democracy* (IPD), *Joint Commission for Bilateral Cooperation* (JCBC), dan kesepakatan bilateral untuk penyaluran bantuan kemanusiaan. Pada masa Menlu Marty, demokrasi Indonesia juga sudah lebih dewasa ketimbang era Menlu Hassan sehingga Indonesia mulai melakukan perubahan dengan mengambil pendekatan yang berorientasi pada Indonesia untuk menjadi percontohan bagi Myanmar untuk mempelajari cara Indonesia bertransisi dari era Dwifungsi ABRI hingga TNI bertugas profesional sebagai alat pertahanan dan keamanan serta tidak berpolitik (Aryani, 2019).

Selain daripada mendorong Indonesia sebagai percontohan, Menlu Marty juga penulis memandang bahwa proses perubahan kebijakan luar negeri yang terjadi

Hino Samuel Jose, 2022

QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

digagas sebagai upaya untuk menyesuaikan lanskap diplomasi agar Indonesia dapat melihat realita tantangan keamanan regional dan rivalitas global dapat diterjemahkan oleh Indonesia dalam suatu posisi strategis yang dapat berlayar di tengah ombak kencang dalam percaturan politik internasional. Studi sebelumnya yang relevan dengan narasi ini menggunakan pendekatan *dynamic equilibrium* untuk mengisi kekosongan celah yang dapat mengancam kelangsungan hidup arsitektur politik keamanan yang sudah terbentuk dan Indonesia berpartisipasi di dalamnya untuk mencegah keruntuhan arsitektur tersebut (Sutiono, Mahroza, & Yusgiantoro, 2019).

Untuk melanjutkan apa yang dibahas pada bagian sebelumnya pada era Menlu Hassan terkait *role conception*, dari beberapa contoh dan diskusi di atas pada era Menlu Marty, maka penulis menyimpulkan peran Indonesia lebih kepada suatu *middle power* yang fokus pada advokasi *vis-a-vis advocator/* advokator. Hal ini sendiri dikarenakan berbeda pada era Hassan Wirajuda yang di mana Kemlu masih melakukan restrukturisasi besar-besaran, di era Menlu Marty, *institutional memory* dan struktur instrumen diplomasi Indonesia sendiri sudah cukup namun pada era Menlu Marty sendiri prinsip bebas aktif itu kembali di cerminkan dalam usaha Indonesia dalam menertibkan dunia terhadap lingkungan eksternal. Setelah fundamental dibangun oleh Menlu Hassan, Menlu Marty melanjutkan bagaimana pendirian Indonesia bebas aktif dibangun dan memperkuat tataran normatif, modalitas doktrin, dan melanjutkan peran Indonesia sebagai *convener* yang mumpuni pasca keberhasilan Indonesia di Konferensi Asia Afrika. Pada era Menteri Marty Natalegawa tidak ada aktivitas khusus seperti pencalonan pada OI yang setingkat dengan DK PBB prestisenya, sehingga diplomasi pada era Menlu Marty di fokuskan pada isu kawasan dan keseharian diplomasi multilateral tetap berjalan seperti biasa, namun Indonesia terus mendorong norma dan prinsip seperti melalui SMU PBB, WTO, dan promosi ASEAN ke dunia multilateral.

Hino Samuel Jose, 2022

***QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI
RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN
KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

C. Diplomasi Multilateral Inward Looking Presiden Joko Widodo: Ambisi, Realita, dan Lingkaran Politik, Ekonomi, dan Keamanan Untuk Kepentingan Rakyat

Diplomasi Indonesia pada era Presiden Joko Widodo sangat membumi dan mengedepankan narasi serta pembangunan politik luar negeri yang merakyat dan *down to earth*. Hal ini memang terjadi karena pengaruh daripada gaya kepemimpinan dan pembawaan politik Presiden Joko Widodo yang sangat pro akan rakyat. Menciptakan diplomasi multilateral yang membumi adalah salah satu cita-cita yang diangankan oleh Presiden Jokowi, namun pada pelaksanaannya memang ini menimbulkan tantangan tersendiri sehingga Indonesia harus melakukan sesuatu proses restrukturisasi kebijakan luar negeri demi memosisikan Indonesia agar lebih koheren dan relevan dalam membumikan diplomasi multilateral. Diplomasi multilateral sulit untuk menghasilkan suatu hasil konkret yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat karena hanya bersifat untuk membangun aturan dan norma (*rule making* dan *norm setting*) serta membahas suatu konteks permasalahan pada lingkup substansi yang lebih luas. Seolah-olah memang ada suatu paradoks diplomasi multilateral para era Presiden Joko Widodo yang memberikan nuansa bahwa diplomasi multilateral tidaklah mempunyai tempat pada politik luar negeri *pro-people* Presiden Joko Widodo. Penulis cukup memiliki pengalaman praktis langsung menghadapi diplomasi multilateral selama masa kerja *internship* penulis di Kementerian Luar Negeri, yang dimana penulis melihat betul proses negosiasi dan pengaturan norma di forum multilateral sangatlah kompleks dan memiliki daya tarik ulur yang kuat namun ketika negosiasi tersebut selesai tidak bisa langsung dirasakan oleh masyarakat dalam lingkup nasional. Selain itu, dari salah satu pembahasan studi sebelumnya, penulis melihat bahwa prinsip diplomasi 4+1 yang didorong Indonesia saat ini menjadi konfigurasi penting yang menjadi *guiding principle* dan arahan strategis untuk mesin diplomasi Indonesia untuk terus mencari cara yang transformatif dan mampu berkontribusi pada kepemimpinan Indonesia walaupun hal tersebut haruslah dilakukan secara antisipatif, fleksibel, dan aktif

Hino Samuel Jose, 2022

QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

(Fathun, 2021). Hal ini menjadi modal dan syarat penting yang penulis argumentasikan disini sebagai suatu keniscayaan apabila *middle power* seperti Indonesia berminat untuk mendalami peran multilateral yang lebih luas tidak hanya berpartisipasi pada pengaturan norma tapi juga menjadi *norm/ rule maker* agar setiap keputusan dari forum multilateral dapat diterjemahkan sebaik mungkin dalam konteks nasional.

Sebelum mengupas lebih lanjut terkait membumikan diplomasi multilateral dan apa saja yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dalam proses restrukturisasinya, penulis memandang penting akan orientasi Indonesia terhadap globalisasi dan bagaimana Joko Widodo yang cenderung mengedepankan narasi populis ini apakah menjadi hambatan atau tantangan dalam menciptakan diplomasi multilateral yang pro terhadap rakyat. Studi sebelumnya terkait politik nasionalisme yang sangat erat dengan narasi diplomasi pro rakyat menekankan ada enam karakteristik: (1) kebijakan yang berfokus pada pengaturan dalam negeri (melihat ke dalam); (2) realita sistem politik yang berfokus pada negara sebagai aktor totaliter yang mengatur segala urusan hingga pada situasi ekstrem sekalipun; (3) reformasi untuk kebijakan dan iklim politik dalam negeri yang mengedepankan *nation building*; (4) penciptaan sistem ekonomi berdasarkan kepentingan negara dan bukan aktor swasta; (5) berusaha untuk menciptakan ketahanan nasional dan mewujudkan kemandirian negara dalam politik dan perekonomiannya; dan (6) persepsi domestik bahwa sistem internasional dan regionalisme baru bisa membawa ancaman (Rourke, 2008). Apabila penulis berangkat membahas berdasarkan enam indikator yang di kemukakan oleh studi tersebut, ada beberapa argumen yang bisa di terjemahkan dalam konteks politik luar negeri Indonesia di era Presiden Joko Widodo. Namun, penulis cukup melihat bahwa indikator keenam yaitu bahwa sistem internasional dan keberadaan regionalisme baru bisa mengancam merupakan argumen yang memiliki dua mata pisau. Regionalisme baru dan sistem internasional yang dinilai mengancam negara yang *inward looking* pada literatur tersebut apabila penulis kaitkan dengan konteks Indonesia, malah menghasilkan pandangan realita yang berbeda. Penulis hanya keberatan pada indikator

Hino Samuel Jose, 2022

QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

ke enam tersebut, namun tetap merasa bahwa indikator dari satu hingga kelima semua relevan dengan apa yang dialami oleh Indonesia. Indonesia mampu mengatasi dinamika sistem internasional dengan menerapkan pertimbangan atas kekuatan dan modalitas yang dimiliki serta formulasi konkret posisi yang melibatkan kepentingan konkret nasional sebagai salah satu faktor perhitungan formulasi polugri melalui dua cara yaitu melalui kebijakan revisionis maupun kebijakan yang mempertahankan status quo terkait isu-isu yang beredar dalam sistem internasional (Plano & Olton, 1999; Delanova, 2017).

Penulis merasa bahwa Indonesia memiliki kesadaran yang cukup tinggi untuk memilah dan memilih kapan harus mempertahankan (*preserving the status quo*) dan kapan harus mengubah realita *status quo* (*being a revisionist state*). Contohnya, terkait isu nuklir dan non proliferasi, Indonesia dapat mengedepankan posisi untuk tetap mendorong agar asesmen yang dilakukan oleh IAEA dan aturan *Joint Comprehensive Plan of Action* atau JCPOA untuk didukung agar verifikasi perkembangan nuklir di negara seperti Iran dapat berjalan; hal ini disampaikan Indonesia pada pertemuan Dewan Gubernur IAEA yang di mana wakil Indonesia berpartisipasi di dalamnya pada Maret 2021 di Wina, Austria (Kemlu RI, 2021). Pandangan yang disampaikan Indonesia dalam isu ini pada pertemuan IAEA merupakan salah satu contoh menurut penulis di mana Indonesia mendorong agar *status quo* terkait rezim pengelolaan nuklir di Iran masih tetap mengikuti apa yang disepakati dalam JCPOA dan tidak merekomendasikan adanya pembentukan mekanisme baru lagi karena JCPOA hanya tinggal membutuhkan hadirnya AS kembali pada pertemuan tersebut. Sementara dari aspek revisionis, kasus yang dapat dijadikan contoh adalah dari kebijakan diplomasi yang Indonesia lakukan terkait isu konflik bilateral Ukraina dan Rusia. Perlu diketahui bahwa pada akhir Juni – awal Juli 2022, Presiden Jokowi melakukan pertemuan dengan negara kelompok G7, mengunjungi Ukraina dan kemudian bertolak ke Rusia. *Shuttle diplomacy* yang dilakukan Presiden Jokowi dalam hal ini menurut penulis adalah suatu hal yang revisionis, dikarenakan bahwa Indonesia bertekad untuk membangun

Hino Samuel Jose, 2022

***QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI
RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN
KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

jembatan dan menengahi konflik tanpa harus melakukan *bandwagoning* atau *balancing* ke salah satu pihak yang bertikai maupun kepada negara *major power* yang berkepentingan juga dalam konflik tersebut dari pihak NATO. Jadi hingga saat ini dapat untuk menjadi catatan bersama bahwa dalam menciptakan diplomasi multilateral yang memiliki hasil konkret dan dapat dirasakan oleh rakyat di tengah paradigma polugri yang *inward looking* pada era Presiden Jokowi, Indonesia dapat melakukan baik mempertahankan *status quo* maupun mengubahnya.

Tentunya yang unik adalah, Indonesia menurut penulis memiliki otonomi kebijakan luar negeri yang cukup mendukung dan proses restrukturisasi kebijakan luar negeri Indonesia sebagai seorang *middle power* aktif juga dapat dilakukan tanpa adanya gesekan dengan kepentingan asing yang dapat mempersempit ruang gerak pengelolaan polugri Indonesia dalam PR menciptakan diplomasi yang pro rakyat. Untuk tambahan, salah satu hal yang mendukung juga adalah gaya komunikasi politik pro rakyat Presiden Jokowi yang menurut penelitian sebelumnya menggunakan *low context communication* dalam berkomunikasi kepada publik (Tinov & Wicaksono, 2015), namun uniknya penulis melihat lebih khusus dalam isu politik luar negeri, Presiden lebih sering mendelegasikan penjelasan tersebut kepada khalayak melalui Menteriannya karena beliau lebih fokus pada pembicaraan strategis dan personal dengan lawan bicara mitra asingnya. Hal ini menunjukkan di satu sisi bahwa ada indikasi bahwa Presiden Jokowi tidak melakukan *micro managing* dan cenderung berhati – hati dan sadar akan keterbatasannya, sehingga Presiden hanya memberi arahan strategis dan kemudian diteruskan oleh Menlu Retno Marsudi pada masa pemerintahannya sejak tahun 2014 untuk menjadi *policy prescription* atau ramuan kebijakan luar negeri Indonesia.

Setelah kebijakan luar negeri yang sangat aktif, transformasional, dan mempromosikan demokrasi yang bertumbuh dan penyelesaian masalah politik regional serta penguatan peran *advocator* Indonesia pada tataran multilateral dan kawasan di era Presiden SBY di bawah kepemimpinan Menlu Marty Natalegawa, Indonesia kemudian mengalami perubahan Pada jaman kepemimpinan Menlu Retno Marsudi di

Hino Samuel Jose, 2022

QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

bawah Presiden Joko Widodo. Penulis harus berargumen, bahwa memang hubungan bilateral terutamanya, dengan negara – negara di kawasan pada era Presiden Jokowi cenderung transaksional terutama serta juga menempatkan diplomasi ekonomi menjadi salah satu prioritas penting kebijakan luar negeri Indonesia yang pro rakyat.

Terdapat studi sebelumnya yang juga berpendapat demikian, di mana Presiden Joko Widodo sangatlah menjadi tokoh yang berpengaruh dalam tatanan global yang multipolar terutama pada isu regionalisme ASEAN (Thu, 2018). Kemudian, lini kebijakan luar negeri pada spektrum politik, keamanan, dan perlindungan WNI semua diselaraskan untuk menciptakan kestabilan demi tercapainya kepentingan diplomasi ekonomi sebagai pilar utama dalam meningkatkan pembangunan nasional (Fitriani & Panduwinata, 2018). Hal ini menjadi muatan utama proses restrukturisasi kebijakan luar negeri Indonesia pada era Jokowi yang kemudian juga dimuat pada dokumen strategi kebijakan penting Indonesia pada era Jokowi yaitu Nawa Cita, RPJMN, Renstra K/L, dan penerapannya dalam bentuk buku putih polugri Indonesia yang disusun secara internal oleh Kemlu sebagai acuan posisi dasar pemerintah dalam berbagai lini penting isu diplomasi Indonesia.

Memastikan bahwa diplomasi multilateral memiliki nilai manfaat konkret juga dilakukan Indonesia dalam agendanya untuk menyejahterakan masyarakat yang bergantung pada industri kelautan dan perikanan. Oleh karena itu, restrukturisasi kebijakan luar negeri Indonesia dari luar ke dalam (*inward approach*) telah dilakukan Presiden Jokowi menyadari pentingnya potensi geoekonomi yang muncul sebagai bagian dari posisi geografis Indonesia di Indo Pasifik. Hal ini membuat lahirnya konsep yang kita kenal sebagai visi Poros Maritim Dunia (*Global Maritime Fulcrum* atau GMF) yang merupakan salah satu instrumen penting yang muncul akibat determinan eksternal yang mempengaruhi proses restrukturisasi kebijakan luar negeri Indonesia. Hal ini dibahas pada studi sebelumnya yang membentuk hubungan antara politik domestik dan rangsangan eksternal mendorong Indonesia di bawah Presiden Jokowi untuk membentuk kebijakan GMF sebagai bentuk nasionalisme yang dalam prosesnya

Hino Samuel Jose, 2022

QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

bisa menghasilkan dua hal yaitu perampangan/ penghematan kebijakan maupun peningkatan asertivitas negara (Sebastian & Chen, 2021). Studi sebelumnya juga membahas juga bahwa GMF yang terwujud pada diplomasi maritim Indonesia juga merupakan bentuk *reality check* bahwa Indonesia semakin meningkatkan diplomasi keamanan non tradisional dan mendorong definisi aksi jelas di level bilateral, regional, dan multilateral (Jose & Fathun, 2021). Yang di mana lebih lanjut apabila penulis mengkaitkan aspek GMF pada restrukturisasi kebijakan luar negeri Indonesia di era Jokowi, maka akan ada beberapa pemikiran penulis yang muncul. Pertama, restrukturisasi yang dilakukan bersifat mereformasi struktur pemerintahan dalam negeri, apabila dalam konteks Indonesia yaitu dibentuknya Badan Keamanan Laut (Bakamla) dan pengembangan struktur TNI AL untuk meningkatkan koordinasi dan cakupan patroli di wilayah perairan Indonesia melawan kejahatan transnasional, eksploitasi, dan pelanggaran kedaulatan.

Restrukturisasi kebijakan luar negeri juga dipengaruhi oleh preferensi kepemimpinan Presiden Jokowi yang menempatkan urusan keamanan, politik, dan lainnya untuk mendukung diplomasi ekonomi. Salah satu contoh konkretnya adalah di mana Indonesia memanfaatkan pengembangan *Maritime Silk Road* yang secara geopolitik merupakan agenda hegemoni Tiongkok untuk dipadukan dengan kesempatan meraih investasi asing dari Tiongkok dan negara lainnya yang berminat untuk disalurkan pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) yang merupakan infrastruktur pendukung kelautan dan logistik Indonesia, serta program Presiden Jokowi yang terkenal yaitu Tol Laut (Nainggolan, 2015). Pada masa kepemimpinan Jokowi juga, Indonesia meraih panggung multilateral saat berperan menjadi ketua *Indian Ocean Rim Association* (IORA) pada tahun 2015 – 2017 berhasil mengadakan beberapa kegiatan penting yaitu: (1) *3rd Indian Ocean Dialogue*; (2) *International Symposium on IORA 20th Anniversary: Learning from the Past and Charting for the Future*; (3) pendirian IORA *Business Center*; (4) publikasi *IORA Guide for Investment*; dan (4) *2nd Blue Economy*
Hino Samuel Jose, 2022

QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Conference serta kegiatan *Workshop on Intersection between Culture and Civilization in Indian Ocean* dan pameran budaya negara – negara IORA. Prioritas kebijakan yang dilaksanakan Indonesia selama masa keketuaannya adalah untuk mendorong penetapan *IORA Concord* sebagai hasil kerja 20 tahun IORA, pelaksanaan KTT IORA pada Maret 2017, pengarusutamaan ide dan konsep GMF dalam diskusi dan pandangan Indonesia di IORA serta penguatan institusional untuk meningkatkan perdamaian dan kestabilan Samudera Hindia dibantu dengan keberadaan Afrika Selatan sebagai Deputi Indonesia dan melaksanakan secara langsung pertemuan Menteri negara IORA di Padang, Sumatera Barat untuk menunjukkan identitas Sumatera Barat sebagai halaman Indonesia di Samudera Hindia (Kemlu RI, 2019). Penulis beranggapan bahwa restrukturisasi kebijakan luar negeri yang diambil Indonesia ketika menjadi ketua IORA 2015 – 2017 fokus pada bagaimana Indonesia dapat mendewasakan IORA dan menciptakan arahan strategis dan peta jalan operasional untuk implementasi program turunan dari enam prioritas kebijakan IORA itu sendiri.

Kemudian studi sebelumnya juga berargumen bahwa pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia di IORA sendiri juga merupakan arena potensial untuk mengembangkan kerja sama komunitas bisnis kelautan dan *blue economy* yang tentunya menjadi salah satu *deliverable* yang terus di dorong Indonesia serta untuk mengedepankan identitas Samudera Hindia sebagai laut yang strategis untuk negara Asia Afrika (Prasetyo, 2016). Selain itu salah satu faktor independen dari restrukturisasi kebijakan luar negeri Indonesia di era Presiden Jokowi dalam rangka untuk mencapai kesejahteraan dan pembangunan kelautan Indonesia melalui GMF mencakup pekanya Indonesia terhadap Samudera Hindia yang di argumentasikan akan menjadi pusat perhatian isu keamanan di abad ke-21 (Kaplan, 2010). Apabila kita ingin membahas pada kerangka berpikir yang runut dibangun pada bagian sebelumnya pada subbab ini, bisa dilihat bahwa Indonesia melakukan tindakan *revisionist* terhadap realita IORA, yang di mana Indonesia mendorong IORA agar menghasilkan suatu media konkret yang dapat dimanfaatkan dalam lini ekonomi, sains, bisnis, dan politik

Hino Samuel Jose, 2022

QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

keamanan untuk membantu kesejahteraan aktor ekonomi biru yang terlibat. Indonesia mengubah IORA pada masa kepemimpinannya untuk membahas isu konkret dengan *deliverable* yang lebih *down to earth* dan bukan menjadikan IORA sebagai forum dialog semata. Selain itu, melalui GMF Indonesia berusaha mewujudkan suatu orientasi kebijakan luar negeri baru yang memosisikan ulang *prestige* dan potensi Indonesia dalam mempertahankan tata kelola regional, kedaulatan, keamanan maritim, dan pengembangan pertahanan nasional di tengah kompleksitas dan peningkatan ancaman tradisional dan non tradisional yang langsung berdampak kepada rakyat yang bergantung pada ekonomi biru Indonesia (Wirawan, 2022).

Diplomasi pro rakyat yang dilakukan Presiden Jokowi adalah juga untuk menyeimbangkan keinginan masyarakat domestik dengan tuntutan imperatif untuk meningkatkan kedaulatan dan ketahanan nasional (Hidayatullah, 2017). Hal ini menurut Presiden Jokowi penting mengingat bahwa negara ini dalam jangka panjang tidak bisa harus melulu bergantung pada negara lain sehingga otonomi kebijakan luar negeri yang lebih luas harus dibarengi dengan ketahanan nasional yang berkesinambungan. Hal ini di elaborasikan pada pidato Presiden Jokowi untuk melakukan aktualisasi kemerdekaan Indonesia dalam seluruh aspek kehidupan bernegara dan mengedepankan identitas Indonesia sebagai negara kepulauan *vis-a-vis* Nusantara dalam berdiplomasi dan membangun kerja sama internasional. Penulis disini melihat bahwa walaupun kebijakan luar negeri Indonesia yang *inward looking* sudah memiliki desain maupun pengaturannya sendiri secara karakter, perilaku, dan norma – perlu tetap dilakukan suatu restrukturisasi agar Indonesia tidak menjadi negara yang tertutup dari liberalisasi kerja sama internasional. Berbeda dengan AS pada era Presiden Trump contohnya, di mana Trump melalui kebijakan nasionalisnya secara khusus menarik AS dari berbagai kesepakatan multilateral dan hanya fokus pada kerja sama bilateral, sementara itu Indonesia walaupun nasionalis masih berperan aktif pada level multilateral melalui posisi yang membumikan diplomasi. Hal ini tentu tidak bisa dilakukan Indonesia tanpa restrukturisasi dan hal ini di bahas pada penelitian Thu et al **Hino Samuel Jose, 2022**

QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

bahwa Indonesia tidak boleh di spekulasikan sebagai negara yang menutup diri dari sistem internasional, melainkan Indonesia mengatur agar sejajar dan mampu menentukan arah pengelolaan diplomasinya secara independen sebagai negara *middle power* (Thu, 2018; Fitriani & Panduwinata, 2018; Pattinusa, 2021).

Untuk kesimpulan, pertama, bahwa apa yang dilakukan pada era Menlu Retno melalui aktivitas polugri Indonesia dari tahun 2014 hingga sekarang melanjutkan usaha dari Menlu Marty namun berjalan pada paradigma yang berbeda. Menlu Retno melanjutkan polugri untuk memperbaiki diplomasi Indonesia untuk menjawab kritik yang dilontarkan terhadap SBY yang dahulu hanya fokus pada *deliverables* normatif namun tidak memiliki daging yang konkret. Menlu Retno juga melakukan restrukturisasi dalam rangka untuk meningkatkan adaptabilitas Indonesia, yang utamanya disebabkan oleh pemerintahan Presiden Jokowi polugrinya dikritik akibat terlalu berat pada diplomasi ekonomi dan menjadikan diplomasi strategis lainnya yang bersifat di luar konteks ekonomi sebagai aktivitas polugri yang transaksional. Menlu Retno kemudian melakukan restrukturisasi untuk peningkatan adaptasi ini dilakukan untuk meningkatkan fungsionalitas politik luar negeri Indonesia. Namun dalam meningkatkan fungsionalitas ini penulis melihat masih adanya dikotomi pandangan, terutama pada dimensi diplomasi multilateral. Dikotomi tersebut menimbulkan situasi di mana apabila fungsionalitas diplomasi Indonesia harus ditingkatkan agar menjadi *middle power* yang fungsional, maka harus mendorong hasil konkret dan adaptasi kemampuan untuk mengatasi masalah – masalah seperti rivalitas global, minilateralisme, sentralitas ASEAN, dan ketidakstabilan keamanan global yang berpengaruh pada rantai pasok ekonomi dunia. Sementara itu partisi lainnya dari dikotomi diplomasi multilateral era Presiden Jokowi ini adalah, di mana apabila Indonesia terus menempatkan diplomasi multilateral sebagai manifestasi diplomasi transaksional, dikhawatirkan bahwa Indonesia akan kehilangan kepemimpinannya di PBB yang membahas pengaturan norma global. Dikotomi ini sendiri, menurut penulis dapat di jawab melalui tiga konstruksi ide: (1) menata kembali infrastruktur diplomasi

Hino Samuel Jose, 2022

QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Indonesia serta keahlian para diplomat untuk membangun dan terus melakukan pemuktahiran perencanaan kebijakan, opsi kebijakan, kemampuan untuk memilah utilisasi instrumen diplomasi, dan mempersiapkan usulan – usulan norma yang akan diusung Indonesia ke level multilateral; (2) restrukturisasi kebijakan luar negeri yang melibatkan peningkatan kemampuan Indonesia agar dapat bertransisi dari sebuah *middle power* normatif menjadi *middle power* yang fungsional di kawasan.

Kaitannya dengan diplomasi multilateral adalah, di mana dari kawasan, peran yang kita ambil, bisa meningkatkan ketahanan dan kemandirian kita serta memperkuat *hedging* dalam navigasi rivalitas global. Hal ini dikarenakan *hedging* dari situasi regional merupakan basis dalam kelangsungan posisi bebas aktif dan *norm entrepreneurship* Indonesia di level multilateral. Penulis melihat hal ini sebagai sebuah keniscayaan sebagai upaya juga untuk menjadikan agar restrukturisasi kebijakan luar negeri tidak hanya memodifikasi perilaku dan aksi kebijakan luar negeri semata, tetapi juga meningkatkan legitimasi dari aktivisme tersebut sebagai *middle power*; dan (3) Indonesia melaksanakan kebijakan luar negeri bebas aktif yang di mana bebas aktif tersebut tidak di netralisir dan tidak pasif yang disengaja. Hal ini penting karena selama ini prinsip bebas aktif merupakan kredensial Indonesia yang membuat berbagai negara memberi pujian bagi Indonesia dan mendukung Indonesia untuk meraih posisi struktural di PBB. Penulis berargumen, bahwa keaktifan dan legitimasi polugri bebas aktif inilah yang membuat juga Indonesia dipercaya sebagai anggota tidak tetap DK PBB karena Indonesia dinilai tidak mudah untuk dibengkokkan dan digoyang oleh oknum negara besar manapun ketika nanti menjadi anggota tidak tetap DK PBB.

Karena identitas politik bebas aktif yang memiliki legitimasi yang kuat dan diterima oleh pihak 193 negara di level multilateral dan 14 negara lain di DK PBB secara khusus akan membantu Indonesia ketika Indonesia mengajukan norma dan solusi usungannya. Apalagi perlu diketahui bahwa intervensi yang dilakukan di PBB terkait isu resolusi konflik akan bersifat sebagai sesuatu intervensi multilateral ke level domestik pihak yang berkonflik, sehingga kepercayaan dari para pihak yang berkonflik

Hino Samuel Jose, 2022

QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

harus ditumbuhkan demi kebaikan implementasi resolusi DK PBB (Bertram, 2008). Contohnya adalah, dalam isu Palestina, Amerika Serikat contohnya masih memberikan ruang untuk *UN Relief and Works Agency for Palestine Refugees in Near East* (UNRWA) dilaksanakan dan tidak melakukan veto terkait resolusi PBB yang memuat kerja UNRWA karena AS masih memiliki kepercayaan kepada Indonesia dan begitu juga Palestina karena Indonesia dikenal politik bebas aktifnya; dan keahlian Indonesia di level multilateral terkait isu Palestina telah memiliki legitimasi yang tertanam dengan baik memberikan citra bahwa Indonesia bukan merupakan agen proksi manapun dan kepentingan di Palestina murni untuk kemanusiaan dan kebebasan perdamaian serta kemerdekaan Palestina dan bukan hasil setiran *major power*.

Kesimpulan kedua dan yang terakhir pada subbab ini adalah, Menlu Retno senantiasa melakukan kebijakan pro rakyat untuk memperbaiki agar Indonesia tidak hanya reaktif, namun juga menempatkan kebijakan luar negeri yang antisipatif dan selektif untuk meningkatkan hasil yang berkaitan dengan kepentingan rakyat. Di waktu bersamaan, Indonesia juga mengambil peran untuk menempatkan Indonesia sebagai pemain regional dan melakukan konsolidasi kepemimpinan Indonesia pada tataran fungsional dan tidak lagi pada aspek normatif karena apa yang dibangun dari Menlu Hassan hingga Menlu Marty sudah menjadi modal yang kuat. Walaupun memang, ada beberapa lini kerja sama yang kurang ditonjolkan sehingga ketika ada perkembangan di kawasan maupun global, Indonesia tidak bisa melakukan apapun kecuali untuk mengekspresikan keprihatinan dan tidak dapat menawarkan gagasan solutif akibat adanya gesekan – gesekan dan tarik ulur yang kuat dari kepentingan komersil (ekonomi, investasi, dan lainnya). Oleh karena itu restrukturisasi juga masih diteruskan terutama pada level kawasan, karena hal ini penting belakangan ini menyusul keketuaan Indonesia di ASEAN pada tahun 2023 serta banyaknya PR yang muncul pasca pandemi COVID-19 di mana celah – celah baru dari multilateralisme terlihat akibat disrupsi nasionalisme selama awal hingga puncak pandemi. Apabila kita berbicara pada konteks yang lebih spesifik pada isu politik dan keamanan,

Hino Samuel Jose, 2022

QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

restrukturisasi yang terjadi pada level polugri kawasan memiliki korelasi yang kuat dengan diplomasi multilateral. Penulis berargumen bahwa Indonesia mendorong posisinya sebagai negara ASEAN dalam forum seperti DK PBB dan forum multilateral lainnya di bawah sistem PBB dengan harmonisasi posisi yang mengacu pada posisi sinergis ASEAN secara keseluruhan.

Hal ini tentunya merupakan hasil seleksi ramuan kebijakan luar negeri Indonesia untuk mempromosikan aspek strategis dari regionalisme ASEAN untuk memperoleh legitimasi dan dukungan dari level multilateral dalam menavigasi sentralitas dan kesatuannya serta mengelola krisis di kawasan yang saat ini juga menjadi perhatian negara – negara di dunia seperti Myanmar, Indo Pasifik, Laut Cina Selatan, dan Pasifik. Ini merupakan bukti juga bahwa diplomasi pro rakyat dilakukan *beyond* kepentingan geostrategis dan geopolitik yang menjadi basis juga dalam *role conception* Indonesia di kawasan sebagai *middle power* (Haryanto, 2016). Dengan demikian dari dua kesimpulan tersebut maka diplomasi multilateral pro rakyat dapat terwujud dengan konfigurasi yang bertujuan untuk meraih kestabilan kawasan, otonomi pengelolaan polugri, menempatkan isu keamanan sebagai prasyarat kerja sama ekonomi pembangunan, dan merealisasikan dan membangun *nation building* Indonesia. Termasuk juga Indonesia di bawah Menlu Retno yang mengarahkan agar Indonesia menjadi pembangun jembatan, *norm entrepreneur* sebagai seorang *middle power* yang bertumbuh dari normatif menjadi yang bersifat fungsional, dan politik bebas aktif serta prinsip visioner turunannya seperti GMF yang menjadi dan membangun modalitas, legitimasi, dan proposisi diplomasi multilateral Indonesia yang pro rakyat.

D. Dinamika dan Proses Restrukturisasi Kebijakan Luar Negeri Indonesia Dalam Sebagai Anggota Tidak Tetap DK PBB

Dalam bagian penelitian ini, analisis akan membahas langsung bagaimana kebijakan luar negeri Indonesia bergulir sebagai anggota tidak tetap DK PBB.

Hino Samuel Jose, 2022

QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Penelitian dalam bagian ini akan mempertimbangkan temuan pre teori yang sudah di bahas pada bagian sebelumnya terkait *process tracing* dari masa ke masa. Dalam bagian ini pembahasan akan berfokus pada proses pencalonan, pemilihan, dan pelaksanaan masa keanggotaan tidak tetap Indonesia di DK PBB. Pada bagian ini, penelitian secara spesifik membahas usaha Indonesia dalam menjaga perdamaian dan keamanan global baik melalui isu keamanan tradisional maupun isu keamanan non tradisional. Kemudian, dari hasil bagian ini, akan dikaitkan dengan peran Indonesia sebagai pembangun jembatan yang juga secara khusus akan di bahas lebih lanjut pada bab keenam.

1. Proses Bergulirnya Pencalonan Indonesia (2016 – 2018)

Process tracing dari restrukturisasi kebijakan luar negeri Indonesia dalam rangka menjadi anggota tidak tetap DK PBB dilakukan secara bertahap dimulai dari tahap pencalonan termasuk kampanye berjalan, saat menjadi anggota, dan sesudah masa keanggotaan selesai. Dimulai dari tahap pertama, penting untuk meninjau kembali proses kampanye dan bagaimana dinamika pencalonan dilakukan karena hal ini juga memiliki muatan politik yang cukup menarik untuk dilihat menurut penulis. Pertama, pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB sudah dimulai setidaknya kurang lebih tiga tahun sebelum keanggotaan dimulai sejak tahun 2016 di mana Indonesia melakukan berbagai kampanye yang dilaksanakan untuk menggalang dukungan sambil menunjukkan kontribusi Indonesia terhadap perdamaian dunia sebagai salah satu donatur pasukan perdamaian PBB dalam berbagai misi perdamaian multidimensional yang disahkan oleh resolusi – resolusi DK PBB. Pengiriman pasukan perdamaian merupakan salah satu jati diri kontribusi Indonesia dalam mewujudkan cita – cita politik luar negeri Indonesia yang diamanatkan pada UUD 1945. Presiden Jusuf Kalla pada saat hadir setelah memberikan pidato Indonesia pada KTT SMU PBB tahun di markas pusat PBB New York, Amerika Serikat kemudian hadir pada resepsi diplomatik yang diadakan oleh PTRI New York pada 22 September 2016 untuk

Hino Samuel Jose, 2022

***QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI
RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN
KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

memperkenalkan intensi Indonesia menjadi anggota tidak tetap DK PBB. Wapres Kalla menyampaikan ajakan menindaklanjuti apa yang disampaikan Menlu Retno sebelumnya terkait pengumuman tema keanggotaan tidak tetap Indonesia di DK PBB yaitu “*A True Partner for World Peace*” serta menyampaikan pentingnya dukungan dan lobi untuk menggalang dukungan (Jakarta Post, 2016).

Untuk catatan, hal ini lazim karena pencalonan Indonesia ke suatu Organisasi Internasional tentunya memerlukan waktu yang cukup lebar untuk mematangkan persiapan, sehingga tahun 2016 sudahlah ideal untuk Indonesia melakukan kampanye pencalonannya ke DK PBB. Kemudian, proses kampanye sendiri dilakukan melalui berbagai kegiatan resepsi diplomatik maupun pembicaraan informal secara bilateral untuk menyampaikan permohonan dukungan kepada Indonesia dari negara mitra, yang di mana dari pengalaman praktis penulis di Kementerian Luar Negeri selama masa kerja di Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral, nantinya akan ada tiga hasil dari lobi bilateral tiap negara: (1) yaitu bahwa *counterpart* sudah mencatat permohonan permintaan dukungan dari Indonesia dan akan meminta arahan ke pusat Kemlu mereka masing – masing untuk dikonsultasikan; (2) *counterpart* memberikan tanggapan positif secara verbal maupun tertulis bahwa akan mendukung pencalonan Indonesia tanpa syarat/ timbal balik apapun; dan (3) *counterpart* menyatakan akan mendukung secara resmi namun meminta Indonesia untuk juga mendukung pencalonan *counterpart* tersebut pada forum lain. Misalkan contohnya ketika Indonesia meminta dukungan ke Afrika Selatan untuk didukung menjadi anggota tidak tetap DK PBB pada saat pemilihan nanti di SMU PBB, Afrika Selatan kemudian sepakat mendukung Indonesia namun meminta pertukaran dukungan agar Indonesia misal mendukung pencalonan Afrika sebagai anggota *Governing Body* dari *International Labour Organization* (ILO) mendatang. Selain resepsi diplomatik, Menlu Retno juga secara aktif menggabungkan butir wicara terkait permohonan dukungan dengan mitra bilateral pada pertemuan bilateral baik yang dilaksanakan di Indonesia maupun di luar negeri. Pada tahun 2017 sendiri, kunjungan Menlu Retno untuk hadir SMU PBB di New York juga diselingi

Hino Samuel Jose, 2022

QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

dengan agenda 70 pertemuan bilateral yang salah satu butir wicaranya adalah memohon dukungan secara langsung (Rini, 2017). Hal ini penting karena umumnya apabila dukungan disampaikan dari pejabat tinggi setingkat Menteri, maka akan lebih “serius” dan lebih konkret untuk diteruskan ke level pejabat di bawahnya untuk dilaksanakan (*top down*).

Sedangkan selain pertemuan bilateral, Kemlu sebagai Kementerian penjuror dalam pencalonan ke DK PBB ini bisa mengadakan resepsi diplomatik di Jakarta mengundang perwakilan dari Kedutaan Besar negara sahabat untuk menggalang dukungan dan melobi aktor aktor penting yang berpotensi untuk menjadi suara penuh dukungan terhadap Indonesia. Namun resepsi diplomatik yang mengundang wakil dari setiap perwakilan asing di Jakarta ini adalah pendekatan dari bawah ke atas (*bottom up*) karena harus disampaikan ke Kemlu pusat negara masing – masing untuk kemudian dimintakan arahan dan ini akan memakan waktu untuk mencari jawaban pasti apakah Indonesia menerima dukungan tersebut secara afirmatif atau tidak. Hal ini karena proses penyampaian hingga ke Menlu negara masing – masing akan memakan waktu yang cukup panjang mengingat masih ada proses birokrasi yang harus dihadapi. Resepsi diplomatik yang diadakan mengundang wakil dari kantor perwakilan negara sahabat juga dilakukan di KBRI – KBRI Indonesia di luar negeri. Selama Indonesia bisa memenuhi di atas dua pertiga (2/3) jumlah total negara yang memperoleh hak voting dalam pemilihan, maka Indonesia bisa menempatkan dirinya pada posisi yang optimis untuk memenangkan pemilihan sebagai anggota tidak tetap DK PBB (Kompas, 2018). Hasil dari mesin diplomasi Indonesia siang malam dua tahun lebih bekerja tidak sia-sia di mana optimisme petinggi Kemlu dan Presiden Jokowi untuk memenangkan pencalonan dibuktikan dalam total 144 suara dukungan setuju untuk Indonesia menjadi anggota tidak tetap DK PBB pada pemilihan yang dilangsungkan pada Jumat 8 Juni 2018 yang di mana secara resmi menandai Indonesia akan duduk di ruangan DK PBB mulai 1 Januari 2019 hingga 31 Desember 2020 (Sinaga, 2018).

Hino Samuel Jose, 2022

***QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI
RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN
KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

2. Proses Perencanaan Kebijakan Prioritas di DK PBB

Menurut Rencana Strategis (Renstra) kinerja Kementerian Luar Negeri tahun 2014 – 2019, ada beberapa hal penting yang di dorong terkait isu – isu yang di bahas di DK PBB. Pertama, mengenai reformasi DK PBB, menurut Renstra Kemlu tentunya Indonesia mendorong perluasan negara anggota DK PBB, kemungkinan menghapus veto, penguatan hubungan kelembagaan DK PBB, keterwakilan negara berkembang *vis-a-vis* negara *middle power*, dan isu lain seperti isu perlindungan warga negara yang sangat erat dengan prioritas 4+1 selain daripada isu keamanan tradisional dan resolusi konflik (Kemlu RI, 2015). Kemudian, dituangkan kembali dalam rencana pengkajian kebijakan Indonesia yang mendorong agar DK PBB lebih transparan, akuntabel, lebih representatif, dan demokratis di tengah tajamnya perbedaan posisi anggota DK PBB yang memerlukan pendekatan *intermediate* pemerintah Indonesia (Kemlu RI, 2015). Penyusunan prioritas kebijakan ini tentunya merupakan bagian dan hasil berjalan dari proses restrukturisasi kebijakan luar negeri Indonesia, dikarenakan Indonesia sadar posisinya harus mendorong konsensus dan bagaimana agar Indonesia dapat memberikan kesan dan citra positif dalam keinginannya untuk terlibat lebih dalam pada proses reformasi DK PBB tidak hanya sebagai pengamat dari luar, tetapi sebagai aktor utama dari dalam DK PBB, sehingga jelas urgensi pencalonan menjadi sangat relevan dan koheren. Diplomasi multilateral yang konkret dan dapat memberikan hasil yang relevan dengan prioritas dalam negeri menjadi agenda Indonesia, sehingga reformasi DK PBB menjadi urgensi penting. Hal ini disebabkan, dan penulis sependapat pada argumen ini, berdasarkan studi sebelumnya yang menyatakan bahwa di PBB terdapat berbagai kerancuan normatif yang membuat prinsip dan penerapan dari norma yang ditetapkan sebagai fundamental peran PBB dalam menjaga perdamaian dunia kemudian hanya menjadi alat permainan politik internasional negara besar saja yang tidak bisa di operasionalkan (Rosenfeld & Sajo, 2012).

Selain itu sebelum adanya Indonesia hadir kembali di DK PBB, pembangunan jembatan antar kepentingan sangatlah minim dilakukan oleh para negara *middle power*

Hino Samuel Jose, 2022

QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

yang menjadi anggota E-10 DK PBB sebelum Indonesia. Hal ini membuat tarik ulur dan penyusunan norma cenderung di dominasi oleh kekuatan keras (*hard power*) dan intervensi militer sebagai bagian dari kegiatan diplomasi yang juga didukung dengan interdependensi ekonomi dengan negara besar, yang tentunya menurut penulis membuat para *middle power* E-10 yang hadir di DK PBB tidak berdaya. Hal ini sejalan dan relevan dengan apa yang dibahas oleh studi sebelumnya terkait ketidakseimbangan dan hambatan yang diakibatkan terhadap laju diplomasi multilateral (Johnstone, 2011). Faktor – faktor inilah yang menyebabkan penyusunan prioritas tersebut yang dituangkan dalam Renstra Kemlu membuat penulis yakin bahwa itu semua relevan. Namun penulis berpendapat, bahwa tidak semua prioritas tersebut dapat terwujud dalam resolusi DK PBB konkret (catatan bahwa setiap resolusi DK PBB mengikat secara hukum/ *legally binding*). Sehingga, terkait reformasi DK PBB, penulis bahkan sejak sebelum mulai menganalisis bagian ini menaruh pesimisme karena eksistensi veto masih ada dan tentunya harus ada kompromi yang diberikan oleh para negara P5, yang dalam hal ini menjadi perhatian khusus yang membuat Indonesia menaruh *bridge building* sebagai salah satu upaya kunci.

Apabila kita berbicara dalam konteks domestik, kita bisa melihat bahwa Presiden Jokowi memberi arahan kepada Menlu Retno untuk menjadikan Indonesia sebagai mitra sejati perdamaian dunia melalui rekam jejak dan upaya yang dipercontohkan dari level kawasan dan identitas polugri Indonesia, yang di mana hal ini sudah di bahas pada bagian sebelumnya pada bab penelitian ini. Lebih lanjut, studi sebelumnya membahas bahwa penyusunan kebijakan prioritas Indonesia di DK PBB tahun 2019 tersebut khususnya pada reformasi dan isu turunan lain seperti proliferasi nuklir, resolusi konflik, dan penguatan rezim instrumen hukum internasional merupakan bentuk tindak lanjut partisipasi aktif Pemri dalam *World Summit* 2005 yang juga mengintegrasikan pembahasan urgensi reformasi DK PBB (Hidriyah, 2018). Hasil dari *World Summit* menjadi pengaruh dari eksternal ke internal penyusunan dan perencanaan kebijakan luar negeri Indonesia di DK PBB. Hal ini penting karena

Hino Samuel Jose, 2022

QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Indonesia ingin menempatkan dirinya sebagai wakil suara negara berkembang agar lebih dilibatkan dalam arsitektur keamanan internasional. Dalam kaca mata proses restrukturisasi kebijakan luar negeri, restrukturisasi untuk penyesuaian dan harmonisasi perubahan kebijakan luar negeri Indonesia akan isu reformasi dan penguatan kelembagaan DK PBB dimulai sejak Presiden Jokowi pada Konferensi Asia Afrika di Jakarta pada tahun 2015 menyampaikan bahwa perlu ada keterlibatan yang di dorong penuh juga oleh negara Asia Afrika dalam proses reformasi dan penguatan DK PBB (Kemlu RI, 2016). Hal ini menurut penulis adalah suatu kelanjutan dari apa yang dilakukan oleh Menlu Marty Natalegawa dan Menlu Hassan melalui hasil deklarasi dan kerja di bawah mekanisme *New Asian African Strategic Partnership* (NAASP) yang diteruskan oleh Presiden Jokowi. Walaupun demikian, ternyata penulis masih melihat kekurangan, walaupun NAASP menjadi referensi penyusunan prioritas DK PBB, yang sangat baik untuk di referensikan, tidak ada pertemuan NAASP hingga tahun 2019 ketika Indonesia memulai keanggotaannya sebagai E-10 DK PBB. Menurut penulis sebenarnya keberadaan pertemuan tersebut penting untuk membahas persiapan/ tindak lanjut dari KAA 2015 sebagai bentuk “sosialisasi” persiapan untuk *stocktaking* atau apapun itu menjelang keanggotaan DK PBB dimulai yang dipimpin Indonesia bersama negara NAASP. Hingga saat penelitian ini disusun, NAASP masih dalam keadaan dorman dan tidak menjadi fokus karena para aktor di dalamnya sedang berkuat dengan isu aktual yang lebih penting dan pandemi COVID-19. Studi sebelumnya menyatakan bahwa kelangsungan NAASP akan bergantung pada apakah semua negara anggotanya memiliki pandangan yang sama terkait urgensi untuk melanjutkan operasionalisasi NAASP pada level inter-regional (Dlamini, 2019).

Perjalanan ini kemudian dilanjutkan dalam pembentukan 4+1 prioritas keanggotaan Indonesia di DK PBB, jadi apabila tadi bersifat visioner, maka ini akan lebih bersifat spesifik dan telah mengalami penyesuaian agar koheren dengan konteks operasional tugas sehari – hari Indonesia sebagai E-10 DK PBB. Pertama, untuk memperkuat ekosistem dan geopolitik untuk menciptakan dunia yang stabil dan damai

Hino Samuel Jose, 2022

QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

melalui penyelesaian yang damai dan konstruktif melalui operasi perdamaian dan promosi penyelesaian sengketa melalui mekanisme kemitraan dan regionalisme. Dari prioritas pertama ini, ada beberapa kata kunci yang bisa diambil yaitu penyelesaian damai, stabilitas, kemitraan, dan regionalisme. Keempat kata kunci tersebut merupakan bentuk rasionalisasi yang menurut penulis, berangkat dari asumsi perilaku *middle power* yang telah di bahas sebelumnya, dan Indonesia sebagai pembangun jembatan melaksanakan modalitasnya juga untuk mempromosikan semangat yang dilakukan di ASEAN (regionalisme sebagai penyelesaian konflik) untuk dilakukan juga dan memposisikan Indonesia sebagai percontohan melalui kemitraan regionalisme dalam resolusi konflik ini. Studi sebelumnya yang mendukung dan relevan dengan argumentasi penulis juga menyatakan bahwa kehadiran institusi regional dapat membantu penyelesaian konflik karena organisasi kawasan memiliki relevansi yang lebih kuat dalam membantu proses mediasi, seperti contoh pada masalah resolusi konflik di Afrika Timur yang apabila tanpa kehadiran *African Union* (AU) kemungkinan akan mengalami proliferasi konflik intra negara dan antar negara yang lebih parah (Khadiagala, 2009). Kemudian studi sebelumnya juga membahas bahwa regionalisme lebih efektif sebagai tindakan preventif terhadap proliferasi konflik karena dapat mengatasi akibat – akibat konflik yang lebih parah akibat hadirnya aktor eksternal di luar kawasan dan situasi sistem yang anarki, karena konstruksi rezim keamanan di kawasan lebih memberikan area kepercayaan (*confidence and trust building*) yang lebih luas (Alagappa, 1995).

Kedua, Indonesia memprioritaskan agar DK PBB dapat membangun sinergi dengan organisasi regional dalam menjaga perdamaian dan stabilitas melalui hubungan kelembagaan serta agar lebih luasnya ruang dalam mengelola krisis suatu negara melalui aktor kawasan terdekat dengan negara tersebut. Hal ini serupa dengan studi yang penulis bahas pada poin pertama, dan satu hal yang pasti adalah, hal ini merupakan wujud aspirasi Indonesia dalam mempromosikan keinginan ASEAN juga yang ingin membuka hubungan langsung dengan DK PBB karena isu yang menjadi

Hino Samuel Jose, 2022

***QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI
RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN
KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

perhatian PBB seperti LCS, Myanmar, dan proliferasi nuklir di Indo Pasifik menjadi irisan isu yang juga menjadi kepentingan ASEAN. Ketiga, Indonesia melalui DK PBB sadar akan pentingnya pencegahan terorisme yang memerlukan pendekatan komprehensif yang juga mencakup pencegahan gerakan radikal masyarakat dan gerakan ekstrem. Studi sebelumnya mengedepankan isu ini menjadi penting karena peningkatan globalisasi menjadi tantangan karena dapat menjadi fasilitator hadirnya teroris dan sindikat kejahatan transnasional (Stoica, 2016). Keempat, adalah pembangunan berkelanjutan, yang tentunya Indonesia di DK PBB akan mendorong seperti implikasi keamanan pada isu ekonomi, SDGs, dan peranan perempuan dan pemuda menjadi perhatian penting dalam cakupan isu keamanan dan perdamaian internasional.

Hal ini dikaji dalam studi sebelumnya sebagai bagian dari isu keamanan non tradisional yang di mana DK PBB memiliki peran aktif untuk menyelesaikan isu yang berorientasi dan berat pada pengaruhnya terhadap manusia secara langsung, serta bagaimana keamanan non tradisional ini semakin relevan untuk dibahas; serta studi yang menekankan bahwa agenda keamanan non tradisional/ keamanan manusia adalah salah satu perilaku negara *middle power* yang memiliki aspirasi tersendiri akan isu itu (Acharya, 2020; Behringer, 2005; Breen, 2011). Dan yang terakhir adalah tambahan satu isu terkait perhatian khusus pemerintah Indonesia pada isu Palestina, yang telah dikaji dan relevansinya sangat kuat dan sudah sangat banyak dibedah dalam penelitian ini sebagai produk diplomasi Indonesia yang diamanatkan sejak Indonesia merdeka (Satrio, 2019).

3. Metode Kerja Baru yang Dilakukan pada Masa Keanggotaan Indonesia di DK PBB

Indonesia berperan penting dalam membawa penyegaran baru dalam metode kerja DK PBB, perlu diketahui sebelumnya, bahwa saat Indonesia menjabat menjadi anggota tidak tetap E-10 DK PBB, dilaksanakan pertemuan baru seperti *Sofa Talk* yang

Hino Samuel Jose, 2022

QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

bersifat lebih informal dan lebih intim ketimbang *Arria Formula Meeting*. Penulis akan lebih fokus pada *sofa talk* karena itu adalah pertemuan yang memang secara khusus dipelopori oleh Indonesia. *Sofa talk* sendiri dihadiri oleh para Wakil Tetap masing – masing negara yang di akreditasikan untuk PBB di New York. Menurut Direktur Jenderal Multilateral Kemlu RI saat itu Bapak Duta Besar Febrian Alphyanto Ruddyard, *sofa talk* merupakan pertemuan yang membahas isu apapun tanpa ada agenda khusus maupun notulensi/ rekaman pertemuan karena sifatnya informal (Septiari, 2019). Sofa Talk yang dipelopori Indonesia merupakan mekanisme baru yang dapat membuka ruang yang lebih leluasa untuk dialog *candid* yang memberikan kepercayaan diri masing – masing Duta Besar untuk membahas isu dan negosiasi yang sedang dilaksanakan secara strategis. Justru, mekanisme kerja DK PBB terkait negosiasi rancangan resolusi, pembahasan amandemen, dan lainnya banyak dilakukan di mekanisme informal DK PBB, sehingga pertemuan debat terbuka hanyalah tinggal merupakan ratifikasi publik dari apa yang berjalan di ruangan tertutup. Seluruh rancangan resolusi bahkan sudah diketahui nasibnya, dan perdebatan yang terjadi di sesi debat terbuka merupakan pernyataan formal sebagai posisi unilateral negara masing – masing yang berbicara pada suatu isu.

Gambar 7. Jenis Pertemuan Dalam Mekanisme Kerja DK PBB

Hino Samuel Jose, 2022

***QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI
RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN
KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Names of Meetings		Participation of Non- Council Members ² in the Discussion	Briefing by the Secretariat	Official Records	Venue	
Meetings of the Security Council (para. 36 of the Note)	Public meetings	Open debate	Non-Council members may be invited to participate in the discussion upon their request	May be conducted	Published	Security Council Chamber
		Debate	Non-Council members that are directly concerned or affected or have special interest in the matter under consideration may be invited to participate in the discussion upon their request	May be conducted		
		Briefing	Only Council members may deliver statements following briefings	Conducted		
		Adoption	Non-Council members may or may not be invited to participate in the discussion upon their request	Not conducted		
	Private meetings	Private meeting	Non-Council members may be invited to participate in the discussion upon their request	May be conducted	Made in a single copy only and kept by the Secretary General	Security Council Chamber
		TCC meeting	Parties prescribed in resolution 1353 (2001) are invited to participate in the discussion, in accordance with the resolution	May be conducted		ECOSOC/TC Chamber or Conference Room
Meetings of Members of the Security Council	Informal consultations of the whole (para. 20 to 27 of the Note)	Non-Council members not invited	May be conducted	Not made	SC Consultations Room	
Informal Dialogue (para. 59 of the Note)		By invitation only	May or may not be conducted	Not made	Conference Room	
"Arria-formula" meeting (para. 65 of the Note)		By invitation only	Usually not conducted	Not made	Conference Room or Permanent Mission of an SC Member	

Penelitian ini memandang bahwa keberadaan *sofa talk* memberikan beberapa kesimpulan penting sebagai wujud dari restrukturisasi kebijakan luar negeri Indonesia di DK PBB. Pertama, bahwa kehadiran *sofa talk* menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya fokus pada norma, kebijakan, posisi nasional, kepemimpinan dan lainnya, tetapi juga fokus pada pendekatan *soft power* yang bertumpu pada kemampuan diplomat melakukan pendekatan antar personal yang lebih intim dan privat untuk membantu penyelesaian negosiasi yang mungkin *deadlock* karena kakunya suatu prosedural pertemuan. Kedua, *sofa talk* merupakan inovasi politik luar negeri Indonesia untuk menyelesaikan hambatan yang kadang muncul dalam negosiasi akibat ketidaksepahaman atau kurangnya pendekatan personal dalam membangun komunikasi yang lebih cair dalam membicarakan isu – isu tertentu. Indonesia di sini mengambil posisi sebagai inovator melalui pertemuan informal yang lebih efektif dan bersifat komplementer terhadap keberadaan *Arria Formula Meeting* yang masih cenderung bersifat sebagai dialog kebijakan terbuka seperti seminar. Ketiga, *sofa talk* merupakan bukti bahwa wujud restrukturisasi kebijakan luar negeri Indonesia menggunakan pendekatan kolaboratif ketimbang asertif, serta mendorong dialog

Hino Samuel Jose, 2022

QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

inklusif yang lebih nyaman untuk semua pihak tanpa harus ragu untuk memberikan kompromi – kompromi yang diperlukan untuk memutuskan terkait isu tertentu secara privat dan terpisah dari ruang publik yang penuh mata non anggota dewan DK PBB.

4. Isu Keamanan Tradisional (Proliferasi Nuklir, Palestina, dan Isu Politik Keamanan Internasional)

Ada beberapa isu yang menjadi perhatian tentunya, yaitu isu Palestina, proliferasi nuklir, dan isu keamanan lainnya yang menjadi pembahasan di DK PBB. Adapun pada bagian ini penulis akan lebih fokus pada membahas secara keseluruhan dari aktivitas selama tahun 2019 – 2020 di berbagai isu yang di mana Indonesia terlibat dari kacamata restrukturisasi kebijakan luar negeri. Pada tahun 2019 DK PBB mengadopsi 52 resolusi, 15 *presidential statement*, melakukan 258 dalam berbagai format, dan 49 butir agenda dibahas dengan total 12 Presidensi, 2 resolusi besar untuk isu terorisme, 2 misi lapangan baru, 2 resolusi dasar baru terkait perlindungan warga sipil, dan Indonesia menjadi Presiden DK PBB pada bulan Mei 2019 (United Nations, 2019). Sementara itu pada tahun 2020, DK PBB sendiri mengadakan 269 pertemuan virtual, 81 pertemuan publik dan privat, 57 resolusi, dan 13 *presidential statement* DK PBB; selain itu juga dicapai misi lapangan baru di UNITAMS, UNAMID, UNIOGBIS, dan juga adopsi esolusi terkait peninjauan kembali struktur *Peacebuilding Commission* (United Nations, 2020).

Berikut ini adalah tabel pembagian per isu di DK PBB yang di mana Indonesia aktif berpartisipasi selama tahun 2019 dan 2020. Tabel ini tidak mencakup semua detail pertemuan, penulis hanya memilih pertemuan yang dirasa vital dan memiliki dampak dalam menjelaskan proses restrukturisasi kebijakan luar negeri *middle power* Indonesia sebagai *bridge builder* sesuai dengan batasan topik penelitian ini.

Tabel 1. Kegiatan Indonesia di DK PBB pada tahun 2019 & 2020 pada isu Politik dan Keamanan

Hino Samuel Jose, 2022

QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

No.	Butir Agenda	Kegiatan
1.	Isu Palestina	<p>Posisi Indonesia</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mendorong implementasi <i>two state solution</i> dan mendorong peningkatan aktivitas bantuan yang disalurkan UNRWA. • Meningkatkan bantuan bilateral Indonesia – Palestina secara langsung. <p>Kegiatan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indonesia menjadi <i>co-penholder</i> bersama Kuwait sejak Januari 2019 untuk penyusunan <i>press elements</i> (gagal diadopsi karena tidak disetujui AS). • Memastikan agar DK PBB tetap memberikan perhatian pada isu Palestina secara berkala (<i>remain seized on the matter</i>). • Menyusun <i>press statement</i> DK PBB untuk mengancam penutupan kantor Misi Internasional di Hebron yang gagal disepakati karena tidak disetujui AS. • Penyelenggaraan diskusi informal <i>Arria Formula Meeting</i> mengenai pemukiman ilegal Israel di Palestina bersama Kuwait dan Afrika Selatan sebagai <i>co-host</i> sebagai tindak lanjut resolusi DK PBB 2334/2016 pada Mei 2019. • Menegosiasikan <i>Press Statement Elected 10</i> untuk keperluan pernyataan pers para anggota E-10 DK

Hino Samuel Jose, 2022

QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

		<p>PBB, disepakati setelah negosiasi yang mendapat pertentangan, dibacakan oleh Jerman selaku Koordinator E-10 pada November 2019.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pada tahun 2020 sendiri masih tidak ada resolusi DK PBB yang berhasil diadopsi serta tidak ada <i>Presidential Statement</i> yang berhasil diadopsi terkait isu Palestina. • Indonesia melaksanakan debat terbuka virtual DK PBB pada 22 Mei 2020 terkait isu Timur Tengah termasuk Palestina yang membahas juga konteks COVID-19 dalam isu Palestina dan tempat tinggal ilegal yang dibangun Israel. <p>Analisis Restrukturisasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indonesia melakukan <i>tweaking</i> terhadap prosedur dengan mengeluarkan keterangan pers yang disusun antara anggota tidak tetap E-10 tanpa melibatkan P5. • Perubahan ini menunjukkan bahwa Indonesia terus mendorong usaha kolaboratif dan sadar akan realita yang kompleks apabila menempuh mekanisme reguler seperti biasa. • Indonesia mengubah rencana dan siasat kebijakan luar negerinya menanggapi tantangan yang berat dari P5 dengan cara yang lebih konstruktif tanpa
--	--	---

Hino Samuel Jose, 2022

QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

		<p>sikap yang asertif dan terus menjaga <i>confidence</i> antar negara E-10.</p> <ul style="list-style-type: none"> Indonesia berusaha membangun jembatan antara negara E-10 yang awalnya tidak sependapat akan rilis pers informal tersebut, dan Indonesia berhasil juga menjaga <i>status quo</i> kelangsungan isu dengan cara non konvensional dalam level negara di DK PBB.
2.	Isu Myanmar	<p>Posisi</p> <ul style="list-style-type: none"> Mendukung pendekatan konstruktif terhadap Myanmar dengan memberikan perspektif berimbang dengan kolaborasi DK PBB, UNHCR, dan ASEAN. Mencatat perkembangan pengungsi Myanmar yang semakin banyak dan mendorong agar ada dukungan terhadap ASEAN oleh DK PBB. Memandang penting perlunya <i>fact finding mission</i> dari PBB untuk verifikasi laporan aktual di lapangan terkait HAM dan akuntabilitas Myanmar untuk implementasi rekomendasi yang telah diberikan. <p>Kegiatan</p> <ul style="list-style-type: none"> Pertemuan informal “<i>What ASEAN can do In Rakhine State?</i>” pada 18 Februari 2019.

Hino Samuel Jose, 2022

QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

		<ul style="list-style-type: none"> • Diskusi bilateral dengan <i>Chair</i> dari <i>Independent Commission of Enquiry (ICOE)</i> Myanmar pada 18 – 19 Agustus 2019. • Merancang program Dialog Khusus DK PBB untuk Peningkatan Kemitraaan dengan negara Asia Timur untuk bahas <i>confidence building measure</i> perdamaian di kawasan (tidak terlaksana). <p>Analisis Restrukturisasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indonesia membuka kesempatan dan mengambil inisiatif pertama untuk membuka jalur kerja sama ASEAN dan DK PBB untuk isu Myanmar. Disini terdapat perubahan polugri di mana Indonesia secara proaktif mendorong kelembagaan dan tidak hanya norma dan program unilateral Kemlu. • Upaya penyesuaian polugri dengan memanfaatkan ruang gerak prosedural untuk kegiatan substansial belum sepenuhnya terakomodasi dalam realita di DK PBB karena waktu Presidensi Indonesia yang hanya 1 bulan dan padatnya jadwal DK PBB untuk kegiatan tambahan yang bersifat tingkat tinggi. • Indonesia berhasil membangun jembatan antara cakupan diplomasi multilateral dengan isu kawasan yang dihadapi <i>middle power</i> di ASEAN walaupun belum ada hasil konkret yang tercapai.
--	--	--

Hino Samuel Jose, 2022

QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

		Namun dalam hal ini Indonesia berhasil menetapkan <i>institutional memory</i> terkait hal ini di DK PBB.
3.	Isu Nuklir Iran	<p>Posisi Indonesia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengajak agar AS kembali ke JCPOA, dan secara proaktif mendorong implementasi JCPOA. • Mencatat perkembangan untuk pemuktahiran masukan terhadap posisi Pemri dalam isu proliferasi nuklir Iran. • Sepakat bahwa JCPOA adalah instrumen yang sudah layak dan wajib dilanjutkan untuk denuklirisasi Iran. <p>Kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pertemuan dengan Kepala Sekretariat JCPO dan Kepala <i>European External Action Service</i> (EEAS) pada November 2019 untuk bahas keberlanjutan implementasi JCPOA.
4.	Isu Timur Tengah dan Afrika lainnya	<p>Posisi Indonesia</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dorong dialog politik inklusif dan hentikan pertumbuhan jumlah korban warga sipil yang berjatuhan. • Perlindungan pada akses bantuan kemanusiaan. • Menindaklanjuti laporan dari <i>briefing</i> situasi lapangan oleh Misi Multidimensional PBB.

Hino Samuel Jose, 2022

QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

		<p>Kegiatan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adopsi resolusi DK PBB 2477 (2019) untuk perpanjangan misi perdamaian <i>UN Disengagement Observer Force</i> atau UNDOF di Suriah. • Rilis <i>presidential statement</i> DK PBB pada 5 Juli 2019 terkait serangan udara di pusat tahanan migran di Tripoli. • Indonesia <i>co sponsor</i> resolusi DK PBB 2457 (2019) bertemakan “<i>Silencing the Guns</i>” bersama Afrika Selatan. • Perpanjangan mandat misi MONUSCO (Resolusi 2463), sanksi DRC (Resolusi 2478), embargo untuk CAR (Resolusi 2488), perpanjangan sanksi CAR (Resolusi 2454). • Perpanjangan UNISFA dan UNAMID (2569 & 2479), perpanjangan resolusi Sudan Selatan (2459 dan 2471), MINURSO (2468), MINUSMA (2480), sanksi Mali (2484), Somalia (2461) untuk UNSOM, perpanjangan mandat AMISOM (2472) dan perpanjangan UNIOGBIS (2458). • Pelaksanaan <i>Indonesia Africa Infrastructure Dialogue</i> dan <i>Indonesia – Africa Forum</i> pada tahun 2019. • 8 pertemuan virtual terkait isu Timur Tengah, non proliferasi, UNAMI, Laporan Tahunan Sekjen PBB terkait ISIS, dan adopsi resolusi DK PBB.
--	--	---

Hino Samuel Jose, 2022

QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

		<ul style="list-style-type: none"> • 2 Briefing terbuka dan 2 konsultasi tertutup terkait isu UNIOGBIS dan Somalia. Serta 10 pertemuan tertutup terkait isu Yaman, Suriah, dan Mali. <p>Analisis Restrukturisasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indonesia belum melakukan pendirian yang aktif karena untuk isu Afrika semua keputusan masih sebatas perpanjangan mandat dan keputusan dari resolusi sebelumnya. • Mendorong kerja sama pembangunan untuk ciptakan stabilitas domestik dan kestabilan kekuasaan politik di negara – negara yang masih rawan. • Persiapan substansi dan perencanaan prioritas dalam mewujudkan diplomasi multilateral yang pro rakyat sangat ditonjolkan pada isu Palestina dan perdamaian di Timur Tengah dan kawasan Asia Tengah. Dalam isu Afghanistan dan Palestina, Indonesia secara aktif memberikan bantuan konkret kepada kedua negara.
5.	Isu Afghanistan	<p>Posisi Indonesia</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indonesia mendorong perdamaian di Afghanistan yang bersifat <i>Afghan-led</i> dan <i>Afghan-owned</i> untuk mewujudkan rekonsiliasi nasional.

Hino Samuel Jose, 2022

QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

		<ul style="list-style-type: none"> • Indonesia menawarkan jasa <i>good offices</i> untuk menjadi jembatan dalam rekonsiliasi konflik dan meminta agar hak wanita dan anak terus dilindungi. • Indonesia melaksanakan kerja sama teknik dan bantuan luar negeri dengan Afghanistan dalam berbagai bentuk. • Mendorong melalui OKI dan DK PBB sebagai dua lini utama serta Konferensi Ulama di Bogor pada tahun 2019.
		<p>Kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indonesia bersama Jerman menjadi <i>co-penholder</i> isu Afghanistan di DK PBB yang menghasilkan 1 resolusi perpanjangan UNAMA pada September 2019. • Indonesia menjabat menjadi Ketua Komite Sanksi 1988 Taliban yang bertugas mengelola daftar hitam individual yang terkena sanksi oleh PBB. • Menlu RI tergabung menjadi anggota <i>Friends of Woman of Afghanistan</i>. <p>Analisa Restrukturisasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indonesia menjadi percontohan di mana peran negara <i>middle power</i> dapat memberikan hasil alternatif yang konkret selain daripada <i>nation building projects</i> (era Obama) maupun operasi anti

Hino Samuel Jose, 2022

QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

		<p>terorisme (era Trump) yang dilakukan pasukan AS di Afghanistan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hingga saat ini pada saat penelitian ini disusun pasca Taliban meraih tahta pemerintahan Presiden Ghani, penulis melihat Indonesia masih mampu membangun relasi dengan Taliban untuk menjamin keamanan WNI dan aset diplomasi RI di Afghanistan. • Peran RI sebagai <i>co-penholder</i> menjadi bukti bahwa <i>role conception</i> Indonesia dapat diterima dan menjadi legitimasi RI sebagai pembangun jembatan dalam berbagai lini konflik di Asia dan Afrika.
--	--	--

Sumber: Kementerian Luar Negeri, 2021 & diolah oleh penulis

5. Isu Keamanan Non Tradisional (Terorisme dan Kejahatan Transnasional)

Indonesia telah dua kali menjalani masa presidensi di DK PBB pada Mei 2019 dan Agustus 2020, Indonesia telah melakukan perannya sebagai Presiden dengan terus membuat DK PBB produktif dan dapat membahas semua isu yang dimandatkan kepada DK PBB untuk dibahas dan diselesaikan. Tiga pertemuan *high level open debate* atau debat tingkat tinggi dan satu pertemuan *Arria Formula Meeting* DK PBB yang membahas terorisme dan kejahatan transnasional (*Linkage of Counterterrorism and transnational organized crime*). Indonesia sendiri memiliki tiga fokus poin utama dalam penanganan masalah kejahatan transnasional dan terorisme di tengah pandemi Covid-19 untuk mencegah proliferasi konflik yang notabene diakibatkan oleh jaringan sindikat terorganisir. Negara anggota DK PBB seperti AS memberikan pandangan mengenai agenda kejahatan transnasional dan terorisme yang dibawa Indonesia di

Hino Samuel Jose, 2022

QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

mana agenda ini merupakan salah satu upaya berkelanjutan untuk memajukan perdamaian dan keamanan internasional setelah diadopsinya resolusi DK PBB No. 2396, AS menekankan pada poin dari resolusi 2396 yang menetapkan bahwa negara anggota PBB harus membuat daftar hitam dan daftar pengawasan untuk mengawasi semua individual yang terafiliasi dengan jejaring teroris dan sindikat organisasi transnasional (US Mission to UN, 2020).

Tidak hanya AS, beberapa negara lain bahkan yang di luar keanggotaan DK PBB seperti Ukraina diundang oleh Indonesia untuk menyampaikan posisi dan pandangan mereka terhadap isu tematik yang Indonesia pimpin. Kemudian, Ukraina dalam pidatonya menekankan pada pentingnya kerja sama spesifik di dalam kawasan untuk mencegah ancaman yang semakin melebar – dan juga inovasi teknologi yang berkelanjutan dan aman untuk memastikan agar keamanan siber dan kepentingan lain bisa diamankan yang didukung dengan menutup celah hukum bagi para pelaku. Selain itu, Ukraina juga sempat menyinggung aneksasi dari Rusia dan situasi ekstrimisme dari para masyarakat akar rumput di Ukraina yang dilakukan salah satunya melalui aktor non negara (Permanent Mission of Ukraine to UN, 2020). Selain Ukraina, Australia juga hadir pada pertemuan tersebut dan menyampaikan bahwa perlu ada kapabilitas kolektif karena isu ini dapat membahayakan masyarakat secara finansial dan menekankan pada peran mereka sebagai tuan rumah dari Konferensi Tingkat Menteri terkait pencucian uang dan pendanaan terorisme pada November 2019; selain itu ditekankan juga oleh Australia bahwa Global Counter Terrorism Forum (GCTF) wajib diperkuat dalam koordinasinya (Australia Mission to UN, 2019). Selain itu Uni Emirat Arab juga hadir dan menyampaikan pentingnya penguatan kerangka hukum untuk melawan teroris dan pendanaan operasi keuangan ilegal yang perlu dilakukan melalui unit intelijen finansial khusus (FIU), UEA juga menekankan pentingnya untuk mendorong implementasi resolusi DK PBB 2347 dan mendorong pertukaran informasi dan identifikasi ancaman melalui *Financial Action Task Force* (FATF) (Mission of UEA to UN, 2019).

Hino Samuel Jose, 2022

QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Setelah mengetahui secercah argumen dan posisi negara lain dalam pembahasan di salah satu debat terbuka tersebut pada Agustus 2019, Indonesia memang sebelumnya telah memberi sinyal akan agenda ini untuk di tindak lanjuti pada presidensi Indonesia di Agustus 2020. Hal ini terlihat saat Juli 2019 di mana topik bahasan sejenis dibahas di DK PBB. Indonesia yang diwakili oleh Wakil Tetap RI untuk PBB di New York Duta Besar Dian Triansyah Djani pada 9 Juli 2019 menyampaikan beberapa hal utama yaitu: (1) Penguatan kapasitas dan usaha-usaha hukum harus diperkuat dengan legislasi dalam negeri yang mampu menyelesaikan *legal loopholes* atau celah-celah hukum yang dapat digunakan oleh penjahat transnasional dan jaringan teroris untuk pendanaan operasi mereka; (2) Sentralitas kerja sama internasional harus ditekankan dan membagi informasi dan intelijen yang diperlukan untuk menjamin aktualitas informasi untuk pengawasan dan penguatan penegakan hukum dan perlindungan, yang di mana Indonesia menekankan juga keinginannya untuk menjadi host konferensi kontra terorisme (CTED) 2019; dan (3) Berbagi pengalaman antar negara dan fasilitasi kerjasama dengan dialog kawasan serta Indonesia membagikan juga pengalamannya ketika bersama Australia menjadi *co-chair* pada Bali Process Mechanism yang menghadirkan 49 negara untuk membahas TOC dan terorisme (PTRI NY, 2019).

Setelah pernyataan ini dibawakan oleh Watapri di New York pada Juli 2019 di pertemuan DK PBB, dapat dianalisa di sini bahwa Indonesia juga memiliki tendensi untuk mempromosikan kontribusi Indonesia dalam kerangka kerja sama informal di tingkat kawasan maupun antar kawasan. Dapat kita lihat di sini gagasan *collaborative strategic outlook* yang ditekankan oleh Menlu RI Retno Marsudi pada PPTM 2020 diterjemahkan dalam usulan agenda presidensi DK PBB Indonesia di Agustus 2020 untuk juga memberi navigasi baru pada negara lain mengenai kolaborasi Indonesia dalam isu tematik TOC dan terorisme. Hal ini juga didukung dengan narasi bahwa pengalaman Indonesia yang cukup kelam dalam sejarah dengan teroris membuat pemerintah Indonesia sangat tegas untuk advokasi penyelesaian isu ini. Penulis juga **Hino Samuel Jose, 2022**

QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

melihat bahwa Indonesia prihatin dengan perkembangan dari laporan Sekretaris Jenderal PBB No. S/2020/754 mengenai usaha-usaha yang telah dilakukan oleh negara anggota PBB dan entitas PBB lainnya dalam menyelesaikan hubungan dari TOC dan terorisme *vis-a-vis* dari *concept note* yang diedarkan oleh perwakilan RI di PBB, New York melalui surat No. S/2020/764 yang di edarkan kepada seluruh 15 negara anggota DK PBB untuk mempersiapkan pandangan mereka dan perkembangan dari laporan Sekjen PBB sebelum menghadiri debat terbuka pertama yang di mana Menlu RI Retno Marsudi menjadi *chair* pada 6 Agustus 2020 – adapun *concept note* tersebut perlu diketahui bahwa itu dipublikasikan untuk menyampaikan arah dan prasyarat substansi dari norma kerja sama yang harus dianut oleh DK PBB dalam menyelesaikan masalah terorisme dan TOC yang sangat multidimensional ini.

Pertemuan debat terbuka terkait topik mengenai hubungan kontra terorisme dan kejahatan transnasional yang terorganisir dipimpin oleh Menlu RI sebagai Presiden/*chair* pertemuan pada 6 Agustus 2020. Pada pertemuan tersebut, Menlu RI menyampaikan posisi Indonesia: (1) Terorisme tidak boleh bertumbuh dan resolusi 2532 tahun 2020 telah mencegah proliferasi terorisme dan harus diperkuat; (2) COVID-19 memperparah tantangan keamanan kita dalam mencegah operasi terorisme yang juga termanifestasikan dalam bentuk kejahatan transnasional; (3) penting untuk menyesuaikan kebijakan kita dalam menghadapi terorisme dan kejahatan transnasional dengan sinergi yang lebih besar; (4) kapasitas hukum dan instrumen hukum internasional dapat diterjemahkan menuju aturan domestik; (5) meningkatkan kapasitas untuk para personil penegak hukum dan institusional seperti melalui JCLEC merupakan contoh baik kerja sama internasional dalam mengatasi isu keterkaitan antara terorisme dan kejahatan transnasional. Vietnam juga hadir pada debat terbuka sebagai E10 menyampaikan poin yang sama namun dalam kerangka berpikir implementasi SDG dan mendorong perlindungan publik melalui digitalisasi dan globalisasi kebijakan kita. Tunisia juga menyampaikan perhatian mereka terutama terkait aktivitas terorisme yang menggunakan pemalsuan dokumen travel dan layanan

Hino Samuel Jose, 2022

QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

digital publik, serta perdagangan ilegal untuk mendanai terorisme memiliki asas yang sama dan sangat terkait. UNODC juga hadir pada pertemuan tersebut dan menegaskan bahwa penting untuk menekankan pada kerja sama antar kawasan, penguatan kelembagaan, dan memperhatikan pertumbuhan terorisme dan kejahatan transnasional serta kebutuhan untuk peningkatan kapasitas dan asesmen sektoral.

Setelah memahami beberapa pandangan negara yang berpartisipasi di atas, lebih lanjut terkait isu tersebut, dokumen *concept note* yang di edarkan Indonesia melalui PTRI New York kepada anggota DK PBB lainnya tentu secara jelas menjadi bukti eksplisit objektif Indonesia dalam agenda tematik ini, yang di mana Indonesia dalam surat tersebut menekankan pada beberapa pertanyaan kunci: bagaimana usaha dan solusi dari para negara anggota dapat menyelesaikan masalah TOC dan terorisme termasuk implementasi kerangka hukum yang ada; bagaimana manifestasi dari keterkaitan TOC dan terorisme harus diselesaikan; apa saja tantangan baru yang muncul dari pandemi Covid-19 untuk mempertahankan keadilan (*criminal justice*) dan menyelesaikan semua tantangan dari pandemi; dan bagaimana negara anggota harus merespons tren baru yang muncul dari isu ini serta bagaimana untuk mengimplementasikan solusi praktis yang baik dalam konteks kerja sama kawasan untuk penyelesaian keterkaitan TOC dan terorisme (United Nations, 2020).

Dari beberapa objektif tersebut yang tertulis di atas, terdapat keharmonisan dari strategi Indonesia yang tertuang pada laporan program yang akan diimplementasikan untuk menangani kejahatan transnasional di bawah UNODC. Indonesia sebelumnya dari jangka waktu 2012-2015 telah mengimplementasikan kerja sama *Bali Process* bersama Australia sebagai pembuatan kebijakan untuk solusi praktis dalam penanganan perdagangan manusia dan usaha Indonesia untuk mengatasi permasalahan geografis dan sosialnya dalam mengatasi perdagangan manusia. Namun memang catatan merah yang dimiliki adalah Indonesia harus meningkatkan kapasitas kepolisian untuk melakukan operasi penindakan dan pencegahan – dan dalam hal ini Indonesia juga direkomendasikan mengenai penanganan lebih lanjut pulau-pulau wilayah yang

Hino Samuel Jose, 2022

QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

rawan serta bagaimana kekuatan perbatasan Indonesia dapat ditingkatkan untuk mencakup area perbatasan yang luas (UNODC, 2015). Nilai anggaran Indonesia dalam kasus ini memakan sebanyak 27.133.379 juta USD serta bagaimana konteks pembangunan dapat meningkatkan kapasitas dalam penanganan masalah *human security* yang senantiasa mengancam.

Kemudian, dari dinamika pertemuan debat terbuka dan *Arria Formula Meeting*, Indonesia juga membahas kaitan antara terorisme dan kejahatan transnasional lebih lanjut. Dengan adanya dua pertemuan tingkat tinggi di DK PBB untuk membahas TOC dan hubungannya dengan terorisme, ini menurut penulis merupakan usaha yang cukup serius dikarenakan dari total 12 pertemuan terbuka, 12 pertemuan tertutup, 5 agenda sampingan, dan 12 pertemuan dengan organ di bawah naungan DK PBB dan 2 di antaranya membahas mengenai hubungan terorisme dan TOC menunjukkan diversifikasi dan usaha Indonesia untuk menjaga ketahanan para negara dari para ancaman di tengah pandemi Covid-19. Dari pertemuan DK PBB pada 6 Agustus 2020 contohnya, pembahasan mengenai pola transit dan pembatasan seperti *lockdown* di tengah pandemi Covid-19 akan memberikan tantangan dalam hal keamanan perbatasan – dan para negara-negara anggota DK PBB di situ juga setuju dengan implementasi lanjutan dari resolusi DK PBB No. S/RES/2482 tahun 2019 yang mengatur mengenai penguatan perbatasan laut, darat, dan udara melalui koordinasi yang dilengkapi oleh pengumpulan data yang baik untuk menciptakan praktek yang sesuai. Negara-negara seperti Belgia, Prancis, dan Inggris memiliki pandangan yang sama bahwa kejahatan siber juga harus menjadi bagian dari fokus para negara dalam menangani TOC, namun dalam hal ini tidak dapat menjadi solusi utama dan harus diingat bahwa sinergi antara berbagai aktor harus diperlukan.

Meskipun secara internasional konteks norma pembuatan kebijakan dari negara anggota sudah ditetapkan dengan implementasi dari *UN TIP Protocol*, namun banyaknya masalah dari hulu ke hilir dalam konteks penanganan TOC masih saja menjadi masalah baru. Indonesia juga mengalami hal demikian dikarenakan

Hino Samuel Jose, 2022

QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

kesenjangan ekonomi serta banyaknya faktor eksternal seperti pengungsi juga membuat *human trafficking* dan kegiatan lain yang terafiliasi dengan TOC tetap terjadi. Sebenarnya penulis mengalami kesulitan untuk memahami konteks diplomasi lebih dalam karena diskusi mengenai TOC dan terorisme yang dilaksanakan oleh DK PBB beberapa bersifat tertutup sehingga tidak ada *meeting records*/ transkrip dialog yang tersedia untuk dianalisis lebih lanjut, adapun *open debate* yang dilaksanakan hanyalah bersifat ratifikasi publik.

Indonesia setelah menyelesaikan masa presidensi pada Oktober 2020 terus berpartisipasi secara aktif dalam agenda kejahatan transnasional, Duta Besar RI untuk Swiss di Wina mengatakan bahwa tren dari migrasi pengungsi perlu diperhatikan dikarenakan tren lintas batas yaitu perdagangan manusia memang menurun saat pandemi namun situasi seperti ini bisa ditangani lebih lanjut oleh para sindikat dengan mengganti arah strategi mereka dari cara tradisional hingga cara non-tradisional yang bisa berupa pada bidang kesehatan. Ini disampaikan secara langsung oleh Dubes RI saat konferensi ke-10 mengenai *UN Convention Against Transnational Crime* yang di mana Indonesia dan dunia harus siap dan tidak boleh memberi kesempatan dan mekanisme peninjauan kembali instrumen UNTOC diharapkan dapat mengevaluasi dan meningkatkan kapasitas penegakan hukum melawan TOC (KBRI Wina, 2020). Hal ini lebih lanjut memang sudah diperhatikan oleh Mitchell (2016) bahwa cara-cara inovatif yang dilakukan oleh TOC bersifat variatif dan tentunya ini menuntut Indonesia bahkan ASEAN secara keseluruhan dalam koordinasi dan strategi melawan TOC dan terorisme (Mitchell, 2016). Indonesia juga mengajukan sebuah rancangan resolusi terkait pendekatan komprehensif untuk melawan terorisme dan ekstremisme kekerasan, namun AS melakukan veto terhadap rancangan resolusi ini pada saat voting di September 2020 yang membuat Indonesia gagal mencapai hasil konkret. Justifikasi AS adalah bahwa ranres tersebut tidak dengan baik membahas kepastian dan pengaturan terkait repatriasi teroris (Veronika & Sutiono, 2020). Indonesia tentu kecewa dengan keputusan ini, karena tidak adanya klausul terkait repatriasi tidak

Hino Samuel Jose, 2022

***QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI
RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN
KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

dimasukkan oleh Indonesia karena Kemlu menganggap bahwa tidak semua negara memiliki kesiapan infrastruktur dan beragamnya legislasi domestik yang belum tentu mengatur hal tersebut di negara-negara. Indonesia tahu betul bahwa repatriasi teroris ISIS yang sudah kehilangan status WNI juga merupakan masalah domestik di Indonesia karena banyak penolakan sehingga orientasi polugri Indonesia harus masih mencari ruang aman yang meminimalisir kontroversi.

Untuk kesimpulan, Indonesia pada isu terkait keamanan non tradisional ini pada Presidensi Agustus 2020 berhasil melaksanakan dialog tingkat tinggi terkait hubungan isu kejahatan transnasional dan terorisme pada 6 Agustus 2020, pertemuan dialog tingkat tinggi terkait isu COVID-19 dan tantangan mewujudkan perdamaian berkelanjutan pada 12 Agustus 2020 serta 1 *Arria Formula Meeting* mengenai dampak serangan siber terhadap infrastruktur vital pada 27 Agustus 2020 yang merupakan seri kedua lanjutan dari *Arria Formula Meeting* pertama pada 9 Juli 2019 terkait hubungan keterkaitan terorisme dan kejahatan transnasional. Dengan detail tersebut, maka dapat diperoleh argumen bahwa agenda keamanan kontemporer yang diusung Indonesia terkait isu terorisme dan kejahatan transnasional adalah isu yang sentris kepada manusia sebagai korban dan entitas sentral. Agenda yang dibawa Indonesia terkait hal ini sebagai Presiden DK PBB menunjukkan bahwa Indonesia ingin meningkatkan diplomasinya ke ruang siber yang jarang tersentuh.

Hal ini merupakan kelanjutan dari peran aktif Indonesia dalam kontribusinya pada pembahasan *Open Ended Working Group (OEWG)* on ICT yang hingga saat ini belum bisa menghasilkan suatu instrumen yang disepakati bersama mengenai aplikasi 11 norma siber dalam tatanan internasional melalui sesuatu instrumen hukum yang mengikat. Indonesia berhasil menjadi *norm entrepreneur* dalam hal ini dengan membawa pembahasan siber dan kejahatan transnasional serta kaitannya dengan terorisme ke organ paling tinggi di PBB terlebih dahulu untuk menambah *leverage* Indonesia ke depan pasca masa keanggotaannya di DK PBB selesai. Dengan kata lain, Indonesia menaruh warisan substansi yang perlu diperjuangkan, walau hingga saat ini

Hino Samuel Jose, 2022
***QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI
RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN
KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

kita masih menunggu kelanjutan kepastian nasib dari *rule of law* di ruang siber internasional.

Untuk melihat kesimpulan pada bab ini, penulis ingin membaginya dalam tiga narasi kesimpulan dari proses peninjauan kembali dan analisis restrukturisasi kebijakan RI dari masa ke masa hingga ke DK PBB. Pertama, diplomasi multilateral *middle power* sebagai pembangun jembatan (*bridge builder*) pro rakyat memanfaatkan ruang prosedural untuk mengatasi masalah substansial yang dihadapi akibat sistem yang saat ini belum di reformasi dengan baik di DK PBB. Kedua, Indonesia merupakan negara yang mendapatkan *reception* yang cukup positif dan walaupun Indonesia dan negara seperti AS masih bertentangan pada beberapa isu, namun Indonesia berhasil memperkenalkan cara kerja baru kepada P5 untuk menyelesaikan masalah lebih informal dan santai. Ketiga, restrukturisasi kebijakan luar negeri Indonesia berhasil membuat Indonesia berproses, namun tidak selalu berhasil memberikan hasil konkret karena batasan prosedural dan substansi yang sudah ada sebelum Indonesia masuk ke DK PBB. Namun, narasi diplomasi multilateral *middle power* yang membumi masih cukup relevan dan akan terus menjadi orientasi polugri yang mampu meningkatkan kepemimpinan Indonesia di forum multilateral termasuk DK PBB.

Hino Samuel Jose, 2022

***QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI
RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN
KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]